

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Tahun 2026

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

SEKRETARIAT DAERAH 

RENCANA KERJA 2026



123-456-7890



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SEKRETARIAT DAERAH

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos 25584
Telp. (0751) 4784555 Faximile (0751) Email Setda@padangpariamankab.go.id
Website www.padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR : 005 /KEP/SETDA/2025

TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Paraman Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Lembaran Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);
11. Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 004/KEP/SETDA-2025 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 (Lembaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Padang

Pariaman Tahun 2026

- KEDUA : Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- KETIGA : Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :
- a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
 - b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
 - d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Dinas Sekretariat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas ini, Anggaran Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dibebankan kepada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

Ditetapkan di : Parit Malintang
Pada Tanggal : 22 September 2025



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

RUDY REPENALDI RILIS, S.STP.MM.C.R.B.C

Pembina Utama Madya
NIP. 19790402 199803 1 003

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2026.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga teknis di bidang perencanaan, Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Parit Malintang, 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN



RUDY REPENALDI RILIS, S.STP.MM,C.R.B.C

Pembina Utama Madya
NIP. 19790402 199803 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 7

1.3 Maksud dan Tujuan 9

1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....14

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra 14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 37

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 96

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 99

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 115

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....120

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 120

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 125

3.3 Program dan Kegiatan 128

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH161

BAB V. PENUTUP199

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra	14
2. Tabel Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	15
3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	23
4. Tabel E.81 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Daerah s/d Tahun 2023 Setda Kabupaten Padang Pariaman	28
5. Tabel Capaian Kinerja Pelayanan	46
6. Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	91
7. Tabel Review terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2026	101
8. Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sekretariat Daerah	130
9. Tabel Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	131
10. Tabel Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	161

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja PD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja PD sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya. Renja PD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja PD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja PD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja PD, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-based management*), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja PD adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program

yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja PD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Renja PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

Tidak hanya itu, Renja PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja PD harus mempertimbangkan berbagai

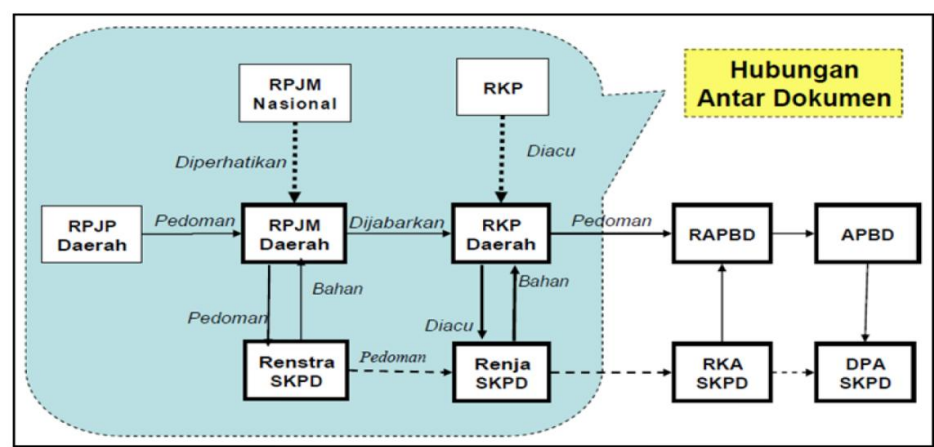
aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja PD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Sekretariat Daerah merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Sekretariat Daerah merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Sekretariat Daerah dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Sekretariat Daerah dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja ini memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Sekretariat Daerah dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Sekretariat Daerah akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 memberikan panduan bagi Sekretariat Dearah untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Sekretariat Dearah diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 menjadi acuan utama bagi Renja Sekretariat Daerah untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai

contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesejahteraan rakyat, maka Renja Sekretariat Daerah akan mencakup program seperti Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat , Program perekonomian dan pembangunan, Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang target indikatornya menunjang pencapaian prioritas RKPD. Dengan demikian, Sekretariat Daerah dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Sekretariat Daerah juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Sekretariat Daerah didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renstra tahun 2025-2029 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 disusun berdasarkan perangkat regulasi sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 8) Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
 - 12) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kera Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 - 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 16) Melaksanakan ketentuan PMK 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya.
- 17) Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 18) Melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 19) Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 220);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Paraman Nomor 4);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Lembaran Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);
- 24) Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 004/KEP/SETDA-2025 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 (Lembaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 Nomor 2);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. Disamping untuk memberikan gambaran tentang program kegiatan pembangunan Sekretariat Daerah tahun 2024 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalisis lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Adapun tujuannya adalah :

- 1) Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- 2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
- 3) Menyelaraskan program dan kegiatan Sekretariat Daerah dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- 4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1** Telaahan terhadap kebijakan nasional
- Sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2** Tujuan dan sasaran Renja OPD
- Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3** Program dan Kegiatan
- Berisikan penjelasan mengenai:
- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Tabel urusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan, Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Target Akhir Periode Renstra OPD, Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024, Perkiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025, Target 2026, Pagu Indikatif (Rp), Lokasi, Sumber Dana, Prioritas Nasional, Daerah, Kelompok Sasaran, Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 .

BAB V. PENUTUP

- Berisikan uraian penutup, berupa :
- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
 - 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
 - 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renja Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra sampai dengan Renja Tahun
--	--	--	--	---	--

									2024, (%)	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit		0%							
Pemeliharaan Mebel	10 Unit	49.500.000	8 Unit	35.020.500	50 %	70,75 %	10 Unit	35.020.500	12 %	70 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 Unit	58.100.000	15 Unit	13.985.000	100 %	24,07 %	20 Unit	176.427.500	50 %	115 %
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	30.000.000	0%	-	0%	0%	-	-	0%	0%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Paket	52.500.000	1 Paket	44.622.000	100 %	84,99 %	3 Paket	97.122.000	60 %	65 %
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	115.050.000	0 Kliping Digital	113.936.600	-	99,03 %	1 Laporan	200.969.600	0%	27 %
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	45.000.000	0 Dokumen	44.207.373	0%	98,24 %	1 Dokumen	133.157.805	100 %	71 %
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	93.390.290	100 %	98,31 %	3 Dokumen	370.508.422	50 %	46 %
	2 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	29.966.100	0%	49,94 %	110 Peserta	160.178.788	25 %	35 %
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Dokumen	38.660.000	4 Dokumen	37.649.787	400 %	97,39 %	6 Dokumen	171.114.902	100 %	57 %

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	A	33.385.723.782	BB	32.034.683.272	80 %	95,95%	A	47.157.510.600	100 %	5.046.227.558
	100%		100%		100 %		200%		200 %	
	BB		B		80 %		B		80 %	

	100%		100%		100%		200%		200%	
	BB		100%							
	100%		100%							
	BB		100%							
	100%		100%							
	BB		100%							
	100%		100%							
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	190.927.577	100%	168.668.209	100%	88,34%	100%	318.202.844		95%
	100%		100%		100%		100%		200%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	134.427.477	6 Dokumen	126.132.375	100%	93,83%	6 Dokumen	208.435.004	50%	113%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	56.500.100	2 Laporan	42.535.834	100%	75,28%	2 Laporan	109.767.840	50%	73%
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	100%	21.287.271.285	100%	20.480.001.002	100%	96,21%	200%	20.561.301.020	100%	3343%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	250/12Orang/bulan	20.819.730.285	250/12Orang/bulan	20.063.305.074	100%	96,37%	250/12Orang/bulan	61.614.465.827		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	386.040.000	12 Dokumen	342.860.000	100%	88,81%	159 ASN	342.860.000	50%	98%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	41.501.000	150 Dokumen	36.849.700	100%	88,79%	200%	73.906.940	200%	51%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul	2 Laporan	40.000.000	1 Dokumen	36.986.228	50%	92,47%	5 Dokumen	81.229.006	42%	68%

anan/Semestera n SKPD										
ADMINISTRA SI KEPEGAWAIA N PERANGKAT DAERAH	63 Orang	1.812.525.70 0	100%	1.442.229. 052	10 0 %	79,5 7%	200%	1.731.015.48 6	20 0 %	199%
Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	70 Paket	63.700.000	70 Paket	-	10 7 %	0,00 %	70 Paket	-	24 %	0%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.543.825.40 0	12 Dokumen	1.380.782. 646	10 0 %	89,4 4%	12 Dokumen	1.597.359.08 0	50 %	819%
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	60 Orang	30.000.100	5 Orang	6.093.720	0 %	20,3 %	5 Orang	12.253.720	8 %	82%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	95 Orang	175.000.200	2 Orang	55.352.686	17 %	31,6 3%	21 ASN	121.402.686	11 %	18%
ADMINISTRA SI UMUM PERANGKAT DAERAH	100%	1.546.838.00 0	100%	1.687.788. 143	10 0 %	109, 11%	200%	3.449.496.14 3	20 0 %	84%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	2 Paket	74.428.500	2 Paket	74.229.585	10 0 %	99,7 3%	2 Paket	148.658.085	50 %	90%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	454.500.000	2 Paket	119.103.00 0	10 0 %	26,2 1%	3 Paket	263.523.000	15 0 %	42%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	149.994.500	3 Paket	124.635.28 0	15 0 %	83,0 9%	3 Paket	274.629.780	27 %	196%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	25.050.000	2 Paket	24.975.000	10 0 %	99,7 0%	2 Paket	50.025.000	50 %	59%
Penyediaan Bahan/Material	2 Paket	124.575.000	2 Paket	115.389.00 0	10 0 %	92,6 3%	2 Paket	233.964.000	50 %	48%
Fasilitasi Kunjungan	1 Laporan	240.650.000	1 Laporan	617.565.51	10 0	256, 62%	1 Laporan	1.238.215.51	50 %	92%

Tamu				4	%			4		
Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	477.640.000	1 Laporan	611.890.76 4	10 0 %	128, 11%	1 Laporan	1.240.480.76 4	50 %	98%
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	425.200.000	100%	231.266.28 0	10 0 %	54,3 9%	200%	592.466.280	20 0 %	367%
Pengadaan Mebel	2 Unit	245.200.000	2 Unit	184.740.63 0	15 0 %	75,3 %	2 Unit	429.940.630	38 %	297%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Paket	180.000.000	2 Paket	46.525.650	10 0 %	25,8 %	2 Paket	162.525.650	25 %	985%
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	3.699.855.94 0	100%	3.817.403. 334	10 0 %	103, 18%	200%	7.739.254.27 4	20 0 %	39%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	55.096.300	2 Laporan	49.820.930	10 0 %	90,4 3%	2 Laporan	104.917.230	50 %	58%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	795.300.000	12 Laporan	768.807.01 4	10 0 %	96,6 7%	12 Laporan	1.564.107.01 4	50 %	36%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	102.590.000	1 Laporan	361.375.39 0	10 0 %	352, 25%	1 Laporan	763.960.390	50 %	318%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	2.746.869.64 0	12 Laporan	2.637.400. 000	10 0 %	96,0 1%	12 Laporan	5.306.269.64 0	50 %	36%
PEMELIHARA AN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	739.570.000	100%	648.983.78 6	10 0 %	87,7 5%	200%	3.133.034.42 8	20 0 %	76%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37 Kendaraan	387.070.000	37 Kendaraan	386.371.880	100%	99,82%	68 Kendaraan	2.707.980.022	31%	69%
Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	1 Unit	244.900.000	1 Unit	213.606.406	100%	87,22%	1 Unit	213.606.406	25%	78%
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	100%	879.538.780	0%	810.054.496	0%	92,10%	0%	1.652.210.489	0%	43%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2/12 Orang/Bulan	797.038.780	2/12 Orang/Bulan	765.432.496	100%	96,03%	2/12 Orang/Bulan	1.540.088.489	50%	44%
FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	100%	1.927.378.800	100%	1.885.713.545	100%	97,84%	200%	4.074.215.604	200%	100%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 Paket	1.226.510.000	12 Bulan	1.192.964.431	100%	97,26%	36 Bulan	2.592.805.518	50%	107%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1 Paket	700.868.800	12 Bulan	692.749.114	100%	98,84%	36 Bulan	1.481.410.086	50%	89%
PENATAUSAHAAN ORGANISASI	2 Dokumen	330.000.000	2 Dokumen	318.696.443	97%	96,57%	2 Dokumen	1.085.819.741	153%	58%
	3 OPD		3 OPD		102%		3 OPD		198%	
	1 Dokumen		1 Dokumen		54%		1 Dokumen		106%	

	1 Laporan		1 Laporan		90 %		1 Laporan		16 9 %	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	82.772.000	4 Dokumen	80.086.629	100 %	96,76%	4 Dokumen	271.518.779	19 %	60%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	80.512.400	4 Laporan	79.306.500	100 %	98,50%	4 Laporan	403.169.374	40 %	114%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	86.788.000	1 Dokumen	84.445.609	100 %	97,30%	1 Dokumen	239.345.947	50 %	37%
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	21.599.600	3 Dokumen	19.948.000	100 %	92,35%	3 Dokumen	19.948.000	17 %	13%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	58.328.000	1 Dokumen	54.909.705	100 %	94,14%	3 Dokumen	151.837.641	50 %	58%
PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	85%	546.617.700	85%	543.878.982	100 %	99,50%	185%	2.820.494.291	185 %	46%
	85%		85%		100 %		185%		185 %	
Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	306.678.500	1 Laporan	306.151.142	0 %	99,83%	1 Laporan	1.146.073.531	27 %	65%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	124.889.200	1 Laporan	123.791.240	100 %	99,12%	1 Laporan	1.473.451.160	50 %	41%
	100%	8.262.767.450		7.750.413.604						
	100%									
	2 kegiatan									

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	75%		100%		100%	93,80%	200%	14.526.630.711	200%	80%
	75%		72%		96%		142%		167%	
	2,800 (tinggi)		2,51		90%		5.560		185%	
ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN		157.000.000								
			35%		154.148.663		55%		92%	
Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	17.000.000	3 Dokumen	16.551.000	300%	97,36%	3 Camat	115.752.571	100%	66%
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peringkat 3	7.641.920.850	Peringkat 5		60%		Peringkat 6		0%	
	60%		60%		100%		150%		166%	
	10%		10%		100%		20%		200%	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	7.581.092.850	10 Dokumen	7.110.840.255	100%	93,80%	10 Hari Besar	12.342.034.738	33%	85%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	2 Dokumen	828.000	2 Dokumen	812.600	100%	98,14%	36 Bulan	167.601.561	50%	36%
FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	90%	413.846.600	90%		100%				173%	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	435 Dokumen	60.148.600	435 Dokumen	60.032.455	45%	99,81%	149 Perbup	196.830.848	55%	66%

Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	298.688.000	10 Kasus	297.934.642	100%	99,75%	9 Orang	783.757.610	50%	83%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	437 Dokumen	55.010.000	437 Dokumen	54.570.023	100%	99,20%	420 Buku LD BD SJDIH	137.119.610	33%	58%
FASILITASI KERJASAMA DAERAH	85%	50.000.000	90%	42.108.866	106%	84,22%	140%	119.688.758	140%	93%
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3 Dokumen	50.000.000	13 Kerjasama	42.108.866	217%	84,22%	19 Kerjasama	119.688.758	50%	93%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		573.107.300		553.960.899,00						
	100%		50%		50%	0,00%	100%	1.352.438.426	100%	41%
	100%		100%		100%		200%		200%	
	12%		26,58%		221%		35,58%		237%	
	100%		100%		100%		200%		200%	
PELAKSANAAN KEBIAJAKAN PEREKONOMIAN	100%	120.365.600	100%	117.239.074	100%	97,40%	200%	356.221.164	200%	62%
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	62.893.850	2 Dokumen	61.343.587	100%	97,54%	6 Dokumen	109.548.487	50%	85%
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	100%	160.000.000	100%	155.241.689	100%	97,03%	180%	504.297.706	180%	

Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	3 Dokumen	60.000.000	3 Kali	59.265.093	100 %	98,78 %	8 kali	139.199.899	45 %	60%
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	97%	247.808.900	100%	238.246.836	103 %	96,14 %	200%	917.303.175	200 %	53%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	101 Dokumen	160.425.600	27 OPD	155.492.879	100 %	96,93 %	27 OPD	511.566.076	100 %	46%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	65 ASN	52.543.300	63 Peserta	49.503.957	105 %	94,22 %	208 Peserta	236.776.158	55 %	86%
PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	100%	44.932.800	100%	43.233.300	100 %	96,22 %	175%	128.577.280	175 %	60%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	23.560.800	1 Dokumen	22.991.000	100 %	97,6 %	18 OPD	74.053.780	50 %	106%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	11.902.500	1 Dokumen	11.270.800	100 %	94,7 %	18 OPD	35.572.000	50 %	53%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	9.469.500	1 Dokumen	8.971.500	0 %	94,7 %	0 Dokumen	18.951.500	0 %	24%

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	1 Dokumen	18.811.750	17 Kecamatan	18.245.700	100 %	96,99 %	51 Kecamatan	75.557.775	50%	52 %
--	-----------	------------	--------------	------------	-------	---------	--------------	------------	-----	------

Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	50.000.000	160 Paket	48.999.500	133 %	98,00 %	1012 Paket	175.539.100	135 %	59 %
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	50.000.000	27 OPD	46.977.096	100 %	93,95 %	81 OPD	189.558.707	300 %	70 %
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	100 Dokumen	34.840.000	497 Paket	33.250.000	276 %	95,44 %	966 Paket	168.960.941	87%	52 %

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Tidakadanya ketersediaan anggaran, di haruskan kegiatan tersebut tidak melaksanakan seperti pada sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemeliharaan Mebel,
- b. Dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang indikator nya belum sesuai dengan yang di jalankan sehingga tidak optimalnya capaian target yang di jalankan oleh bidang tersebut.
- c. adanya kegiatan yang tidak optimal capaian targetnya dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga target yang ditetapkan di awal tahun tidak tercapai.

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

- a. Adanya ketetapan baru untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan yang berimbas pada anggaran kegiatan-kegiatan di Sekretariat Daerah.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis

yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2026:

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2026 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Dinas dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2026 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.
- b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Sekretariat Daerah tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2026, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2026 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Sekretariat Daerah mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2026 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.
- d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Sekretariat Daerah tahun 2026. Jika Dinas tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan

dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus

Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2026. Ini akan membantu Dinas dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2026.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Dinas mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2026. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
s/d 2025

kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
						renstra 2021-2025	2025-2029			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					SEKRETARIAT DAERAH										
4	01	01			<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/LKOTA</u>	<i>Persentase Rekomendasi LHE SAKIP Sekretariat Daerah yang ditindaklanjuti</i>	<i>Indeks Kematangan Organisasi</i>	31	BB	A	BB	80%	100%	BB	80%
	-	-	-	-		<i>Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti</i>	<i>Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik</i>	91,37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

							Tahun N												
	-	-	-	-			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Operasional Pimpinan Sesuai Aturan	100%	B	BB	B	80%	84	B	80%			
	-	-	-	-			Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan dan Operasional Pimpinan sesuai Aturan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah	85	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%			
	-	-	-	-	-		Persentase fasilitasi keprotokolan kegiatan daerah yang sesuai aturan,	Rekomendasi Nilai LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	81		BB	BB	100%	100%	BB	100%			
	-	-	-	-	-		Persentase kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan Pimpinan Sesuai Aturan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%			

	-	-	-	-	-	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang dievaluasi	Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%		BB	BB	100%	25%	BB	100%
	-	-	-	-	-	Persentase Peta Jabatan yang Disusun Tepat Waktu	Persentase Fasilitasi Keprotokolan kegiatan Daerah yang sesuai aturan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	-	-	-	-	-	Persentase UKPP yang difasilitasi	Persentase Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan sesuai strategi Komunikasi	100%		BB	BB	100%	40%	BB	100%
	-	-	-	-	-	Persentase Ketersediaan Data Penyusunan LKJiP				100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	5 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4	01	01	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase Terpenuhinya Peningkatan Pemahaman Hukum Perangkat Daerah			90%	90%	90%	100%	90%	90%	90%
4	01	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan umum dan perlengkapan yang terfasilitaasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa pelayanan kantor yang sesuai dengan SOP yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase Terpenuhinya medical Check Up KDH/WKDH	Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikelola	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
						Persentase Terpenuhinya Pakaian Dinas KDH/WKDH		100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%

4	01	01	2.12		FASILITASI KERUMAHTANGAAN SEKRETARIAT DAERAH	Persentase Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH	Persentase kerumahtanggaan sekretariat daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	2.13		PENATAUSAHAAN ORGANISASI	Persentase OPD yang tepat tugas dan fungsinya	1. Jumlah dokumen penataan organisasi perangkat daerah	2 Dokumen	58%	60%	58%	97%	60%	58%	58%
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Jumlah OPD yang difasilitasi peningkatan pelayanan publik	3 OPD	85,12	83,45	85,12		83,45	85,12	85,12
						Persentase perangkat daerah dengan nilai sapip A ke atas	3. Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang tersusun	1 laporan	27%	50%	27%	54%	50%	27%	27%
						Nilai komponen pelaporan pada LHE SAKIP hasil evaluasi Kemenpan	4. Jumlah Dokumen LKJIP yang tersusun	1 Dokumen	10,81	12	10,81	90%	12	10,81	10,81
4	1	01	2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Persentase kegiatan KDH/WKDH yang sesuai standar keprotokoleran	Indeks Kepuasan Pimpinan	89	85%	85%	85%	100%	85%	85%	85%
						Persentase kegiatan KDH/WKDH yang terdokumentasi dengan baik			85%	85%	85%	100%	85%	85%	85%
4	01	02			<u>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</u>	<i>Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat</i>	<i>Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang efektif dilaksanakan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	-	-	-	-		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah	Indeks Zakat Indonesia	0,645	72%	75%	72%	96%	75%	72%	72%
	-	-	-	-		Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri	Persentase produk hukum yang dihasilkan	100	2,51	2,800 (tinggi)	2,51	90%	2,800 (tinggi)	2,51	2,51
	-	-	-	-			Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan	100							
	-	-	-	-			Persentase Administrasi Tata pemerintahan Yang Dilaksanakan	100							
4	01	02	2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Persentase perangkat daerah yang mempunyai nilai Indikator Kinerja tinggi	Persentase kualitas administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	100%	35%	30%	35%	117%	30%	35%	35%
4	01	02	2.02		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peringkat Kab Padang Pariaman di MTQ Provinsi	Jumlah dokumen kegiatan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	12 Dokumen	Peringkat 5	Peringkat 3	Peringkat 5	60%	Peringkat 3	Peringkat 5	Peringkat 5
						Persentase akumulasi mesjid yg dikunjungi tim safari ramadhan Pemda Kab.Padang Pariaman			60%	60%	60%	100%	60%	60%	60%

						Persentase peningkatan hafiz dan hafizah di Kab. Padang Pariaman			10%	10%	10%	100%	10%	10%	10%
4	01	02	2.03		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase terlaksananya fasilitasi dan bantuan hukum, serta penyelesaian kasus	Indeks Reformasi Hukum	88	90%	90%	90%	100%	90%	90%	90%
							Persentase Publikasi dan Bantuan Hukum yang diselesaikan	100%							
4	01	02	2.04		FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	Jumlah kerjasama daerah yang terfasilitasi	16 Kerjasama	90%	85%	90%	106%	85%	90%	90%
4	01	03			<u>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</u>	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	Persentase Kebijakan pengelolaan perekonomian dan SDA yang Efektif dilaksanakan	100%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%
	-	-	-	-		Persentase laporan realisasi kegiatan OPD yang tepat waktu	Return on Aset (ROA) BUMD	0	100%	100%	100%		100%	100%	100%
	-	-	-	-		Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	1,82	26,58%	12%	26,58%	221%	12%	26,58%	26,58%
	-	-	-	-		Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	Konsumsi listrik per kapita	654	100%	100%	100%		100%	100%	100%

4	01	03	2.01	-	-	Tingkat Kematangan UKPEJ	9							
				-	-	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0							
				-	-	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	88							
				-	-	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	25							
				-	-	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	90							
				-	-	Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan Yang Efektif Dilaksanakan	100							
						PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaa kebijakan perekonomian	Jumlah dokumen kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%

4	01	03	2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase terlaksananya administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kabupaten padang pariaman	Jumlah kebijakan administrasi pembangunan yang dilaksanakan	10 Kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	03	2.03		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan	89	100%	97%	100%	103%	97%	100%	100%
							2. Pemanfaatan Sistem Pengadaan	30							
							3. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	18,46							
4	01	03	2.04		PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam	Jumlah dokumen kebijakan sumber daya alam yang dilaksanakan	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down. Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 tahun 2022 tentang SOTK, Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas sebagai pengampu dari berbagai perangkat daerah ataupun bagi Sekretariat Daerahnya sendiri. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2025-2029 Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan : Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- b). Sasaran : 1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c). Indikator Kinerja : 1. Indeks Berakhlak,
2. Indeks Reformasi Hukum
3. Indeks Pelayanan Publik
4. Indeks Kualitas Kebijakan
5. Indeks Keuangan Akses Daerah

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagai sebuah OPD ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah Mempunyai Fungsi:

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretariat

Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif pada instansi daerah;
- e. pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan/ atau
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretaris Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Sementara itu, dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan Sekretaris Daerah membawahi.

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 bagian yaitu:

1. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama

Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah serta fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama membawahkan 3 (tiga) kelompok Jabatan Fungsional yakni sebagai berikut:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Pemerintah dan Kerjasama
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Administrasi Kewilayahan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Otonomi Daerah

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan

kesejahteraan masyarakat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional yakni sebagai berikut:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Bina Mental Spiritual
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Kesejahteraan Sosial
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Kesejahteraan Masyarakat

3. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Kepala Bagian Hukum membawahkan 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional yakni sebagai berikut:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perundang- Undangan
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Bantuan Hukum
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Dokumentasi Dan Informasi

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 bagian yaitu:

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, sumber daya alam pertanian, perikanan, air dan lingkungan hidup. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahkan 3 (tiga) kelompok Jabatan Fungsional yakni sebagai berikut:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Pembinaan Bumd Dan Blud
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Pengendalian, Distribusi Perekonomian
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

2. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program,

pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan membawahkan 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional yakni sebagai berikut:

1. Kelompok Jabatan Fungsional sub-Substansi penyusunan Program
2. Kelompok Jabatan Fungsional sub-Substansi Pengendalian Program
3. Kelompok Jabatan Fungsional sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten sekretaris daerah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahkan 2 (dua) Subbagian dan 1 (Satu) kelompok Jabatan Fungsional yakni sebagai berikut:

1. Subbagian pengelolaan pengadaan secara elektronik
2. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
3. Kelompok Jabatan Fungsional sub-Substansi pengelolaan pengadaan barang dan jasa

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan. Assiten administrasi umum membawahi 4 (empat) bagian yakni sebagai berikut:

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Kepala Bagian Umum membawahkan 1 (satu) subbagian dan 2 (dua) Kelompok Jabatan Fungsional yakni sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian
2. Kelompok Jabatan Fungsional sub-Substansi perlengkapan
3. Kelompok Jabatan Fungsional sub-Substansi rumah tangga

2. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten sekretaris daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi. Kepala Bagian Organisasi membawahkan 3 (tiga) kelompok jabatan fungsional yakni sebagai berikut:

1. Kelompok Jabatan Fungsional sub-Substansi Kelembagaan dan analisis Jabatan
2. Kelompok Jabatan Fungsional sub-Substansi pelayanan public dan tata laksana
3. Kelompok Jabatan Fungsional sub-Substansi dan reformasi birokrasi

3. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan membawahkan 2 (dua) subbagian yakni sebagai berikut:

1. Subbagian Protokol
2. Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan membawahkan 2 (dua) kelompok Jabaran Fungsional yakni sebagai berikut:

1. Kelompok Jabatan Fungsional sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Kelompok Jabatan Fungsional sub-Substansi Keuangan

d. Staf Ahli

Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Staf ahli yang dimaksud yakni:

1. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan, kajian dan saran, masukan serta pertimbangan kepada Bupati di bidang pemerintahan, hukum dan politik.
2. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan, kajian dan saran, masukan serta pertimbangan kepada Bupati di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.
3. Staf Ahli bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan, kajian dan saran, masukan serta pertimbangan kepada Bupati di bidang sosial, budaya dan sumber daya manusia

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

No	Golongan	Jumlah
1	I	-
2	II	6
3	III	41
4	IV	18
	Jumlah	65

Sumber : Bagian Umum Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Sekretariat Daerah Tahun 2025

komposisi pejabat eselonering di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut dan seluruh jabatan sudah diisi oleh pejabat struktural berdasarkan surat keputusan pelantikan masing-masing

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN ESSELONERING

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pascasarjana (S.II)	22
2	Sarjana (S.I)	33
3	Diploma	0
4	SMA/SMK	10
5	SMP	0
	JUMLAH	65

Sumber : Bagian Umum Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Sekretariat Daerah Tahun 2025

Isu – Isu penting yang masih dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja adalah :

- 1) Belum memadainya kompetensi sumber daya perencanaan.
- 2) Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja organisasi.
- 3) Kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.
- 4) Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 5) Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja Sekretariat.

Meskipun menghadapi berbagai persoalan yang menjalankan fungsinya, Sekretariat masih memiliki kemampuan dan peluang untuk tetap komitmen menjalankan tugas yang diemban dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, serta menjalankan dan memanfaatkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan pemerhati pembangunan daerah, di antaranya adalah :

- 1) Pemanfaatan kapasitas SDM yang ada dengan memaksimalkan fungsi manajerial pimpinan dan penerapan standar operasional prosedur kerja yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- 2) Senantiasa mereview pelaksanaan perencanaan pembangunan dan meningkatkan akurasi data serta memperhatikan masukan dari seluruh pemerhati pembangunan daerah.
- 3) Memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan data secara sistematis, akurat dan cepat dalam suatu sistem informasi.

Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja tahun 2024	Indikator Kinerja tahun 2025	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	100%	100%	100%		dalam penilaian	-			IKU
2	Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti	Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti	100%	100%	100%		117%	-	119%	120%	IKU
3	Jumlah lembaga pendidikan alquran yg telah dibina	Jumlah lembaga pendidikan alquran yg telah dibina	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga		5 Lembaga	-	5lembaga	5lembaga	IKU
4	Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	60 (cukup)	60 (cukup)	60 (cukup)		56,40 (cukup)	-	56,4	57,65	IKU
5	Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	100%	100%	100%		98,70%	-	98,70%	98,80%	IKU
6	persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti.	persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti.	13%	14%	15%		13%	-	15%	16%	IKU
7	Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik	Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik	100%	100%	100%		94%	-	94%	95%	IKU
8	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%		100%	-	100%	100%	IKU

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Sekretariat Daerah Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Perangkat Daerah telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 20234.

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		
			TARGET KINsERJA	REALISASI	PERSEN (%)
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	100%	Proses Pengerjaan	-
2	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1. Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti	100%	117 %	117
		2. Jumlah lembaga pendidikan alquran yg telah dibina	5 Lembaga	5 lembaga	100
3	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah	1. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	60 (cukup)	56,40	94
		2. Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	100%	98,70 %	98,70

4	Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e-procurement	persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti	13%	13 %	100
5	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik	Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik	100%	94 %	94
6.	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100 %	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
- 1) Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti yang realisasi nya mencapai 117 %

2) Jumlah lembaga pendidikan alquran yg telah dibina yang realisasinya mencapai 5 Lembaga

3) persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti yang realisasinya mencapai 13%

4) Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti yang realisasinya mencapai 100%
- b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :
- 1) Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target maish dalam tahap penilaian dari kemendagri.

2) Nilai Indeks Kualitas Kebijakan yang realisasinya dengan nilai 56,40

3) Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah yang realisasinya 98,70 persen

4) Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik yang realisasinya mencapai 94%

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 :

	Sasaran 1 : Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
--	--

Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target

Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang terdapat pada misi ke-1 yaitu “Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban”. Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target.

Capaian kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah gambaran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Capaian kinerja ini meliputi berbagai aspek, seperti kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan akuntabilitas kinerja.

Capaian kinerja makro

Indeks pembangunan manusia, Angka kemiskinan, Angka pengangguran, Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan perkapita, Ketimpangan pendapatan.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

- Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- Kinerja pelaksana tugas pembuatan dan penerapan standar pelayanan minimal Akuntabilitas kinerja Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

LPPD merupakan laporan capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Laporan ini disusun sebagai dasar evaluasi penilaian capaian kinerja.

LPPD juga memberikan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa rekomendasi tersebut, antara lain: Peningkatan pelayanan publik, Pengembangan SDM dan infrastruktur, Penguatan koordinasi lintas OPD

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian indikator kinerja Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target:

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 2.4

Perbandingan Target Dan Capaian Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Capaian	%	
Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	%	100%		100	Proses Pengerjaan

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Berikut ini adalah perbandingan target Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target pada tahun 2023 dengan Tahun 2024:

Tabel 2.5

Perbandingan Target dan Capaian LPPD

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	%	100%	-	100	100%	-	100	Tahun 2023 masih menunggu proses penilaian mendagri Tahun 2024 dalam proses pengerjaan

Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah masih menunggu proses penilaian mendagri di tahun 2023 dan tahun 2024 masih dalam proses pengerjaan.

c) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Faktor pendukung dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah dukungan dari berbagai pihak. Sementara faktor penghambat meliputi kurangnya koordinasi, sumber daya, dan peralatan.

Faktor pendukung Dukungan dari berbagai pihak, Peran serta dari semua pihak.

Faktor penghambat

- Kurangnya koordinasi dan komunikasi
- Sumber daya pegawai dan peralatan yang terbatas
- Belum tersedianya SOP penyusunan LPPD
- Belum adanya dukungan dari pihak-pihak yang berwenang
- Penyusunan LPPD masih bersifat manual dan lambat
- Sarana prasarana yang kurang memadai
- Kurangnya komitmen dan motivasi pegawai
- Kompetensi SDM yang kurang
- Penilaian atas hasil kerja yang kurang
- Indikator Kinerja Kunci (IKK) tidak masuk dalam dokumen perencanaan daerah

d) Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

Strategi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah dengan membentuk tim penyusun, mengumpulkan data, dan melakukan verifikasi data.

Tahapan penyusunan LPPD

1. Membentuk tim penyusun dan tim pereviu
2. Mengumpulkan data dan dokumen pendukung
3. Menyusun, memverifikasi, dan menilai data dasar capaian kinerja
4. Menyusun rancangan LPPD, LKPJ, dan RLPPD
5. Menetapkan dokumen LPPD, LKPJ, dan RLPPD

Komponen-komponen LPPD

LPPD adalah laporan yang menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Laporan ini disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat setiap tahun.

e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kunci keberhasilan penyusunan LPPD

- Komitmen Bersama
- Pemantauan berkala
- Koordinasi yang berkesinambungan
- Data yang berkualitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan
- Kerja sama yang erat antara penyusun LPPD dan admin atau pejabat terkait
- Memberikan umpan balik yang konstruktif selama proses penyusunan berlangsung

LPPD merupakan salah satu perwujudan akuntabilitas, sekaligus pelaksanaan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Gambar 1.

Rapat Evaluasi data Capaian LPPD tahun 2024





Sumber : Bagian TPKS Kab. Padang Pariaman

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dibutuhkan anggaran Rp. 30.000.000,- dengan serapan anggaran tahun 2024 Rp 16.551.000 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 55,17 %. Realisasi kinerja sasaran strategis masih dalam tahapan proses.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

Tabel 2.6

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	Proses Pengerjaan	55,17 %	44,83 %

Efisiensi Capaian Kinerja = penilaian capaian kinerja masih dalam tahap proses pengerjaan
Efisiensi Penyerapan Anggaran = 100%-55,17% = 44,83%
Total Efisiensi = 0 + 44,83%= 44,83%

Sasaran 2 :
Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya

Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti.

Dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang religus, Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2024. Salah satunya adalah pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan.

Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti yaitu pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan, hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 67/KEP/BPP/2024 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Rumah Ibadah tahun 1445 H/2024 dan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 132/KEP/BPP/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Safari Ramadhan dan Penetapan Lokasi Kunjungan Safari Ramadhan Kabupaten Padang Pariaman tahun 1445 H/2024 M.

Secara teknis pelaksanaan kegiatan ini yaitu kunjungan Tim Safari Ramadhan Kabupaten ke 120 Masjid/ Mushalla penerima bantuan Safari Ramadhan, dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan komunikasi antara Pemerintah daerah dengan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Bantuan yang diberikan pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya masyarakat kabupaten Padang Pariaman.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti.

Tabel 2.7

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	Berhasil

Dari Tabel 1 dapat di lihat, Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti dalam kegiatan safari Ramadhan yaitu 120 Masjid/Mushalla sedangkan target yang ditetapkan adalah 120 Masjid/Mushalla dengan kategori “Berhasil”, Artinya

120 Masjid/Mushalla telah dikunjungi tim Safari Ramadhan dan diberikan bantuan masing-masing Masjid/Mushalla sebesar Rp. 7.500.000,-

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 dengan Tahun 2024:

Tabel 2.8

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti.	Persen (%)	-	-	-	100%	100%	100%	Berhasil

Total Masjid/Mushalla = 120 Masjid/Mushalla.

Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Hal ini karena adanya dana yang tersedia dari APBD Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2024.

Keberhasilan Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti dalam kegiatan Safari Ramadhan bukan hanya tanggung jawab Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, FORKOMPINDA dan masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut.

Target dan realisasi dapat tercapai sepenuhnya, berkat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti di Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar. Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Padang Pariaman



Gambar. Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Padang Pariaman



Gambar. Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Padang Pariaman

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya” dibutuhkan anggaran Rp. 900.000.000,- dengan serapan anggaran tahun 2024 Rp 900.000.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 100 %. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indicator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

Tabel 2.9

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti	100%	100 %	0 %

Efisiensi Capaian Kinerja = 100 % -100 % = 0 %
Efisiensi Penyerapan Anggaran = 100%-100% = 0%
Total Efisiensi = 0% + 0 %= 0%

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan ini dapat terlaksana karena komitmen dari Pemerintah Daerah dan dukungan dari FORKOMPINDA dan masyarakat Padang Pariaman, realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 900.000.000,- sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 900.000.000,-. Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 0%, dikarenakan APBD menyediakan semua anggaran sebesar Rp. 900.000.000.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Terjalinya Kejasama yang baik antara Pemerintah Daerah, FORKOMPINDA dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Komitmen Kepala Daerah dalam membuat kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yang ditindaklanjuti untuk masyarakat Padang Pariaman

Berikut adalah tabel 120 Masjid/Mushalla Penerima Bantuan Safari Ramdahan tahun 2024.

NO	NAMA MASJID/ MUSHALLA/ SURAU	NAGARI
Nan Sabaris		
1	Surau Rimbo	Padang Bintungan
2	Masjid Raya Padang Kandang	Padang Kandang Pulau Aia Padang Bintungan
3	Musholla Al-Ikhlâs	Kurai Taji
4	Masjid Raya Sungai Laban	Kurai Taji Timur
5	Masjid Darussalam	Sunua Barat
6	Mesjid Baitul Makmur	Sunua
7	Mesjid Raya Sunur	Sunua Tengah
8	Musholla Angga Baru	Pauh Kambar
9	Mesjid Raya At-Tagwa	Kapalo Koto
10	Surau Gadang Tonggak	Padang Kandang Pulau Aia Padang Bintungan
Lubuk Alung		
11	Surau Al-Ikhlâs	Balah Hilir Lubuk Alung
12	Musholla Darul Wustha	Aie Tajun Lubuk Alung
13	Surau Balanti	Sikabu Lubuk Alung
14	Surau Tawaqal	Punggung Kasiak Lubuk Alung
15	Mesjid Al-Ikhlâs	Sungai Abang Lubuk Alung
16	Surau Darussalam Tanah Taban	Pasia Laweh Lubuk Alung
17	Mesjid Muhajirin	Lubuk Alung
18	Surau Ambacang	Singguliang Lubuk Alung
19	Mesjid Jami' Syech Burhanudin	Salibutan Lubuk Alung
20	Masjid Al Furqan	Balah Hilir Lubuk Alung
2x11 Enam Lingkung		
21	Surau Aie Datang	Sicincin
22	Surau Patamuan Jambak Sigaung	Sungai Asam

23	Surau Pincuran Tembok	Lubuk Pandan
24	Masjid Raya Pauh	Sicincin

Enam Lingkung		
25	Surau Kandang Gadang	Pakandangan
26	Masjid Ikhlas Balah Aie	Koto Tinggi
27	Surau Kapuah	Gadur
28	Surau Korong Padang Baru	Parik Malintang
29	Pesantren Darul Ikhlas Batang Kapecong	Toboh Ketek
30	Masjid Raya Lubuk Idai	Koto Tinggi
2 x 11 Kayutanam		
31	Surau Batang Tapakih	Anduriang
32	Musholla Baithul Makmur	Guguak
33	Mesjid Al-Muttaqin	Kayutanam
34	Musholla Nurul Ikhlas	Kapalo Hilalang
35	Masjid Alhuda Tarok	Kapalo Hilalang
Patamuan		
36	Surau Jambak	Tandikek
37	Masjid Raya Labu Kambuag	Tandikek Selatan
38	Surau Talang Kuniang	Tandikek Utara
39	Surau Polongan Lapau Jambu	Sungai Durian
40	Mesjid Raya Koto Mambang Kampuang Tanjung	Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai durian
41	Surau Batu	Tandikek Barat
42	Masjid Al Hidayah	Tandikek
V Koto Timur		
43	Surau Baru Simpang Gantiang	Kudu Gantiang
44	Mesjid Al Ihsan	Limau Puruik

45	Surau Baru Sungai Kalu	Kudu Gantiang Barat
46	Mesjid Raya Kayu Angik	Gunuang Padang Alai
47	Masjid Nurul Iman	Kudu Gantiang
Batang Gasan		
48	Masjid Raya Gasan Gadang	Gasan Gadang
49	Musholla Nurul Yaqin	Malai V Suku
50	Masjid Raya Balingkuang	Malai V Suku Timur
51	Surau Kampung Tengah	Malai V Suku
Padang Sago		
52	Surau Lapai	Koto Dalam Barat
53	Surau Ungku Abun	Koto Dalam
54	Mesjid Istiqomah	Koto Dalam Selatan
55	Surau Dagang Pasar Padang Sago	Batu Kalang
56	Surau Jambu	Batu Kalang Utara
57	Mesjid Nurul Huda	Koto Baru
58	Surau Mangoi	Batu Kalang

Sintuk Toboh Gadang		
59	Masjid Nurul Iman Palambayan	Sintuak
60	Masjid Al-Hasyar	Toboh Gadang
61	Surau Rambai Toboh Padang Kapeh	Toboh Gadang Selatan
62	Surau Buluah Apo	Toboh Gadang Timur
63	Surau Ketek Toboh Musajik	Toboh Gadang Barat
64	Surau Takapik	Sintuak
Ulakan Tapakis		
65	Surau Manggih Al-Ikhlas	Sungai Gimba Ulakan
66	Surau Kampung Paneh	Padang Toboh Ulakan
67	Surau Jawi-Jawi	Manggopoh Palak Gadang Ulakan

68	Surau Labuah	Sandi Ulakan
69	Surau Parupuak	Ulakan
70	Surau Gauang	Seulayat Ulakan
71	Surau Kalampaian	Kampaung Galapuang Ulakan
72	Surau Korong Syekh H. Musa	Tapakih
73	Surau Rawang	Ulakan
IV Koto Aur Malintang		
74	Musholla Nurul Hidayah	III Koto Aur Malintang Utara
75	Surau Pauah	III Koto Aur Malintang
76	Surau Lenong	Balai Baiak Malai III koto
77	Mesjid Istiqomah	III Koto Aur Malintang Selatan
78	Surau Nurul Taqwa	III Koto Aur Malintang Timur
79	Surau Duku	III Koto Aur Malintang
Sungai Limau		
80	Masjid Taqwa	Pilubang
81	Musholla Paraman Talang	Kuranji Hilir
82	Surau Anjuang	Koto Tinggi Kuranji Hilir
83	Mesjid Nur Ikhlas	Guguak Kuranji Hilir
84	Masjid Mustaqim Padang Olo	Kuranji Hilir
Sungai Geringging		
85	Surau Lansano Buluh Apo	Malai III Koto
86	Surau Kampuang Batu Mengaum	Kuranji Hulu
87	Musholla Nurul Falah Kampuang Tengah	Batu Gadang Kuranji Hulu
88	Surau Durian Kambuik	Sungai Sirah Kuranji Hulu
89	Surau Ungku Tuo	Kuranji Hulu

V Koto Kampung Dalam

90	Musholla Taqwa Tandikat	Campago
91	Musholla Al-Hidayah Tapai Aia Lansano	Sikucur
92	Musholla Kincie Tumpaiak Kinaro	Sikucur Tengah
93	Mesjid Darussalam	Sikucur Utara
94	Musholla Taqwa (Surau Ampangan)	Campago Selatan
95	Musholla Baiturrahman	Sikucua Timur
96	Surau Ambacang Korong Bayur	Campago Barat
97	Masjid Nurul Hidayah	Sikucua Barat
98	Ponpes Dinul Maruf	Sikucur
VII Koto		
99	Musholla Nurul Falah	Lareh Nan Panjang
100	Surau Kijang	Lareh Nan Panjang Barat
101	Musholla Kampung Dama	Lareh Nan Panjang Selatan
102	Surau Sianik	Lurah Ampalu
103	Surau Tengah Padang	Balah Aia
104	Mesjid Sungai Tareh	Balah Aia Utara
105	Surau Nurul Iman	Balah Aie Timur
106	Surau Dagang	Sungai Sariak
107	Surau Manggih	Lareh Nan Panjang Sungai Sariak
108	Musholla Panti Kayu	Bisati Sungai Sariak
109	Surau Labuah	Limpato Sungai Sariak
110	Surau Al-Faizin	Ambuang Kapua Sungai Sariak
111	Surau Kampuang Tengah	Limpato
Batang Anai		
112	Musholla Nurul Hidayah Pangka Rajang	Sungai Buluh Timur
113	Musholla Al hasanah	Kataping
114	Surau Amanah	Sungai Buluh Barat
115	Mesjid Asra	Kasang

116	Musholla Darussalam	Sungai Buluh
117	Musholla Taqwa	Buayan
118	Musholla Al-Ikhlas Gunung	Sungai Buluh Selatan
119	Musholla Nurul Yaqin	Sungai Buluh Utara
120	Surau Kampung Jambak	Kasang

Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina

Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina

Lembaga Pendidikan Alqur'an yang telah dibina oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah lembaga pendidikan Alquran yang melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar Alqur'an dan kegiatan menghafal Alquran.

Persentase Lembaga Pendidikan yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius.

Dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang religus, Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2024. Salah satunya adalah meningkatkan Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman:

Tabel 2.10

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina	5	5	100%	Berhasil

Dari Tabel 1 dapat di lihat, Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 yaitu 5 Lembaga sedangkan target yang ditetapkan adalah 5 Lembaga dengan kategori “Berhasil”, Artinya 5 Lembaga Pendidikan Al-Qur'an telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang diadakan oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina pada tahun 2023 dengan Tahun 2024:

Tabel 2.11

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina	Lemba ga	5	5	100%	5	5	100%	Berhasil

Total lembaga yang dibina : 5 lembaga

Pada tabel 2.11, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina pada tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

Keberhasilan peningkatan kehidupan yang religius terutama Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, bukan hanya tanggung jawab Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut.

Target dan realisasi dapat tercapai sepenuhnya, berkat tingginya minat putra-putri Padang Pariaman dalam belajar Al-Qur'an yang di dukung semakin banyaknya Lembaga Pendidikan Al-Qur'an di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar. Proses Belajar Mengajar di Lembaga Pendidikan Alquran



Gambar. Proses Belajar Mengajar di Lembaga Pendidikan Alquran



Gambar. Proses Belajar Mengajar di Lembaga Pendidikan Alquran

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya” dengan indicator sasaran strategis “Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina” dibutuhkan anggaran Rp. 30.000.000,- dengan serapan anggaran tahun 2024 Rp 0 dikarenakan kondisi keuangan daerah yang tidak memadai,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 0 %. Tetapi Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indicator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

Tabel 2.12

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina	100%	0 %	100 %

Efisiensi Capaian Kinerja = 100 % -100 % = 0 %
Efisiensi Penyerapan Anggaran = 100%-0% = 100%
Total Efisiensi = 0% + 100 %= 100%

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan ini dapat terlaksana karena dukungan dari berbagai pihak di Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sekolah penyelenggaran Rumah Tahfiz, realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 0,- sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 30.000.000,-. Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 100%, dikarenakan APBD tidak menyediakan anggaran.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Terjalinya Kejasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya sekolah tempat Rumah Tahfiz dilaksanakan

Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman sangatlah tinggi

Berikut adalah tabel 5 Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2023.

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1	Rumah Tahfiz SDN 05 2x11 Enam Lingkung	Enam Lingkung
2	Rumah Tahfiz SDN 07 Sintuk Toboh Gadang	Sintuk Toboh Gadang
3	Rumah Tahfiz SDN 08 Enam Lingkung	Enam Lingkung
4	Rumah Tahfiz SMPN 1 Ulakan Tapakis	Ulakan Tapakis
5	Rumah Tahfiz SMPN 1 Nan Sabaris	Nan Sabaris

Berikut adalah tabel 5 Lembaga Pendidikan Alquran yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2024.

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1	Rumah Tahfiz SDN 05 2x11 Enam Lingkung	Enam Lingkung
2	Rumah Tahfiz SDN 07 Sintuk Toboh Gadang	Sintuk Toboh Gadang
3	Rumah Tahfiz SDN 08 Enam Lingkung	Enam Lingkung
4	Rumah Tahfiz SMPN 1 Ulakan Tapakis	Ulakan Tapakis
5	Rumah Tahfiz SMPN 1 Nan Sabaris	Nan Sabaris

	Sasaran 3: Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah
--	--

Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Daerah

Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan Daerah merupakan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang terdapat pada misi ke-5 yaitu “Meningkatkan peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah”. Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah nilai Indeks Kualitas Kebijakan.

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah alat ukur untuk menilai kualitas kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur proses pembuatan kebijakan, pengelolaan agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Pada tahun 2023 telah terbit Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menetapkan di dalamnya Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan untuk mengukur Area Perubahan Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan. Dengan kata lain, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menjadi salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional.

Ruang lingkup jenis kebijakan yang diajukan sebagai sasaran pengukuran kualitas kebijakan dengan instrumen IKK diambil menggunakan kriteria sebagai berikut:

Kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran dan telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun dari waktu dimulainya pengukuran IKK;

Kebijakan yang sifatnya tidak rutin ditetapkan berdasarkan periodisasi tertentu dan kebijakan yang tidak mengatur ke dalam/internal instansi.

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Daerah:

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 2.13

Capaian Persentase Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Interpretasi
	Target	Capaian	%	
Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	60	56,40	94 %	Berhasil

Dari Tabel 1 dapat di lihat, Persentase Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2024 yaitu 94% dari target yang ditetapkan dengan kategori “Berhasil”.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Pelaksanaan Self Assesement Indeks Kualitas Kebijakan baru dilaksanakan di tahun 2024.

- Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja
- Keberhasilan dari capaian indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagai berikut :
- Komitmen pimpinan, baik pimpinan daerah maupun pimpinan OPD, dalam melaksanakan Self Assesement Indeks Kualitas Kebijakan (IKK);
- Sinergitas yang baik oleh Tim Kerja Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari admin instansi yang bertugas untuk mengelola seluruh proses penilaian IKK pada portal SI IKK dan Tim Enumerator yang melaksanakan teknis/operasional penilaian IKK dalam portal SI IKK;
- Rutin melakukan rapat koordinasi Tim SAKIP Kabupaten untuk memastikan capaian kinerja dengan tujuan kinerja berdasarkan selaras rencana kerja yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga dapat ditindaklanjuti untuk agenda penyelesaian kinerja.
- Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Self Assessment IKK 2024 ;
- Melakukan penyusunan SK Tim Kerja Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Daerah.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Belum dianggarkan khusus untuk pelaksanaan kegiatan Indeks Kualitas Kebijakan.

Pelaksanaan Rapat Persiapan Self Assesment Indeks Kualitas Kebijakan



Upload Populasi Kebijakan

Daftar Kebijakan

MASTER DATA

Daftar Enumerator

BANTUAN

Help Desk

ADMIN INSTANSI (Kabupaten Padang Pariaman 2024)

Ali Mustofa, S.STP., MM.

KEBIJAKAN DIAJUKAN

12

KEBIJAKAN DISETUJUI

6

KEBIJAKAN DITOLAK

6

DAFTAR KEBIJAKAN

Kebijakan Diajukan

Kebijakan Disetujui

Kebijakan Diproses

Kebijakan Selesai

No

Nama Kebijakan

Tanggal Berlaku

File

Status

1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

07/11/2023

Ditolak

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2020

5	TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA	20/12/2023		Ditolak
6	PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN IBU KOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 - 2043	10/11/2023		Ditolak
7	PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TUBERKULOSIS, KUSTA DAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS - ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME	17/05/2021		Proses
8	PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	26/08/2021		Proses
9	PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES	22/10/2021		Disetujui
10	PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI	23/09/2021		Disetujui
11	PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PERAN NAGARI DALAM KONVERGENSI PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING	23/09/2021		Proses
12	PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PEMANTAUAN PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN DAN GANGGUAN TUMBUH KEMBANG ANAK DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	24/09/2021		Disetujui

Aktivasi akun enumerator

ADMIN INSTANSI (Kabupaten Padang Pariaman 2024)

Ali Mustofa, S.STP., MM.

Daftar Kebijakan

MASTER DATA

Daftar Enumerator

BANTUAN

Help Desk

DATA ENUMERATOR

Tambah Enumerator

Search...

No	Nama	Unit Kerja	NIP		
1	dr. Efri Yeni, M.Kes	Dinas Kesehatan	197304082002122002	Ubah	Hapus
2	Dian Permata, S.P, M.Si	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	198411142009021001	Ubah	Hapus
3	Ferawati, S.Gz	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	198405092008042001	Ubah	Hapus

25

50

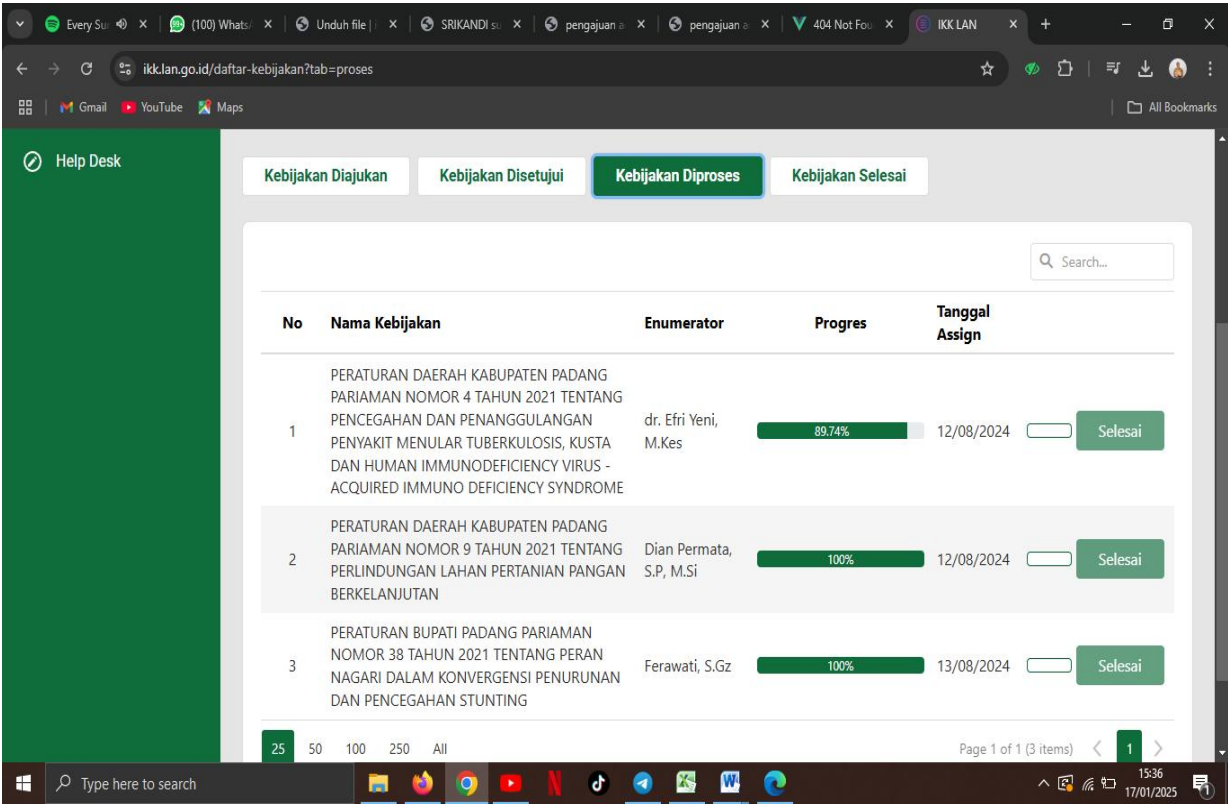
100

250

All

Page 1 of 1 (3 items) < 1 >

Enumerator Input data kebijakan



Persentase bahan kebijakan yang ditetapkan sebagai kebijakan daerah

Bahan kebijakan daerah adalah bahan yang disiapkan untuk merumuskan kebijakan pemerintah daerah. Bahan kebijakan daerah dapat disiapkan oleh Bagian Tata Pemerintahan.

- Bahan kebijakan daerah yang disiapkan oleh Bagian Tata Pemerintahan:
- Bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan
- Bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama
- Bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi kewilayaan
- Bahan perumusan kebijakan di bidang otonomi daerah
- Bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
- Bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
- Bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
- Bahan pelaksanaan pembinaan administrasi

Kebijakan daerah

Kebijakan daerah adalah peraturan daerah atau keputusan gubernur yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan.

Sekretariat daerah

Sekretariat daerah membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Sekretariat daerah juga bertugas untuk Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Membina administrasi dan aparatur pemerintah daerah

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Daerah:

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 2.14

Capaian Persentase Persentase bahan kebijakan yang ditetapkan sebagai kebijakan daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Interpretasi
	Target	Capaian	%	
Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	100 %	98,70 %	98,70	Berhasil

Dari Tabel 1 dapat di lihat, Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah 2024 yaitu 98,70% dari target yang ditetapkan dengan kategori “Berhasil”.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Untuk perbandingan Target tahun 2023 mencapai 90,03 % di tahun 2024 meningkat menjadi 98,70 %

Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Faktor pendukung penetapan kebijakan adalah kondisi yang membantu kegiatan berjalan, sedangkan faktor penghambat adalah kondisi yang menghambat kegiatan berjalan.

Faktor pendukung :

- Komunikasi,
- Struktur birokrasi,
- Sumber daya,
- Disposisi.

Faktor penghambat

- Isi kebijakan yang kurang jelas
- Kurangnya ketetapan kebijakan

- Kekurangan sumber daya
- Kekurangan informasi
- Kurangnya dukungan
- Keterbatasan anggaran
- Keterbatasan sumber daya manusia
- Keterbatasan sumber daya fasilitas pendukung
- Ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, antara lain: Komunikasi, Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, Faktor sumber daya, Sikap pelaksana.

Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

Langkah-langkah dalam strategi penetapan kebijakan secara umum adalah:

- Identifikasi masalah, Penyusunan agenda, Perumusan kebijakan, Pengesahan kebijakan, Implementasi kebijakan, Evaluasi kebijakan

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kunci keberhasilan dalam penyusunan kebijakan adalah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, kebijakan juga harus didasarkan pada prinsip demokrasi, transparansi, akuntabel, dan keadilan.

Faktor-faktor keberhasilan penyusunan kebijakan

- Komunikasi

Komunikasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan.

- Sumber daya

Ketersediaan sumber daya yang memadai dapat mendukung implementasi kebijakan.

- Disposisi

Disposisi yang baik dari berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan.

- Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang efektif dan efisien dapat mendukung implementasi kebijakan.

- Demokrasi, transparansi, akuntabel, dan keadilan

Kebijakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut.

Langkah-langkah penyusunan kebijakan

Identifikasi masalah kebijakan, Penyusunan agenda, Perumusan kebijakan, Pengesahan kebijakan, Implementasi kebijakan, Evaluasi kebijakan



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah” dengan indicator sasaran strategis “Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah” dibutuhkan anggaran Rp. 70.008.500,- dengan serapan anggaran tahun 2024 Rp Rp 60.148.600 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 85,91 %. dan Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 98,70%.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indicator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

Tabel 2.15

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah	Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	98,70%	85,91	14,09

Efisiensi Capaian Kinerja = 98,70 % - 100 % = - 1,30 %
Efisiensi Penyerapan Anggaran = 100%-85,91% = 14,90%
Total Efisiensi = -1,30% + 14,90 %= 13,6 %

Sasaran 4 :
Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e- procurement

Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e- procurement merupakan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang terdapat pada misi ke-2 yaitu “Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat”. Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti.

E-Procurement Merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang seluruhnya atau sebagian dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kebijakan E-Procurement Adalah aturan, pedoman, atau instruksi yang ditetapkan untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Capaian Sasaran Strategis:

Mengukur seberapa efektif kebijakan e-procurement yang telah ditetapkan berhasil diterapkan dalam praktik pengadaan barang/jasa. Ini bisa diukur dari berbagai aspek, seperti:

Jumlah transaksi yang menggunakan e-procurement: Semakin banyak transaksi yang menggunakan sistem elektronik, semakin tinggi capaiannya.

Persentase kebijakan e-procurement yang ditindaklanjuti: Menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam pengadaan.

Efisiensi waktu dan biaya: E-procurement diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya dalam proses pengadaan.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Sistem elektronik mempermudah pengawasan dan pelacakan proses pengadaan. Capaian kinerja makro

Indikator ini penting karena:

- Mendukung tata kelola yang baik: Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan.
- Mengurangi praktik korupsi: Sistem elektronik dapat meminimalkan celah untuk tindakan korupsi.
- Mendorong persaingan sehat: E-procurement membuka peluang bagi lebih banyak penyedia barang/jasa untuk berpartisipasi.
- Meningkatkan kualitas pengadaan: Sistem elektronik dapat membantu memastikan kualitas barang/jasa yang diadakan.

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian indikator kinerja Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target:

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 2.16

Target Dan Capaian Persentase Indikator Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Capaian	%	
Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	%	13	13	100	Berhasil

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Berikut ini adalah perbandingan target indikator Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti Target pada tahun 2023 dengan Tahun 2024:

Tabel 2.17

Perbandingan Target dan Capaian Indikator Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
Indikator Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	%	n/a	n/a	n/a	13	13	100	Berhasil

Pada tabel 2.17, dapat dilihat bahwa indicator Indikator Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan barang dan Jasa yang ditindaklanjuti di tahun 2023 belum dilaksanakan sedangkan untuk tahun 2024 capaian indikator sasaran telah mencapai 100% dan dikategorikan Berhasil.

Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Faktor pendukung utama dalam mencapai persentase kebijakan e-procurement yang tinggi adalah adopsi teknologi, regulasi yang mendukung, dan peningkatan kesadaran akan manfaat e-procurement. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi kendala teknis, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta potensi risiko keamanan data.

Faktor Pendukung:

- Adopsi Teknologi:
Infrastruktur teknologi yang memadai dan sistem e-procurement yang user-friendly akan memudahkan proses pengadaan barang dan jasa.
- Regulasi yang Mendukung:
Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan mendukung pelaksanaan e-procurement akan menciptakan kepastian hukum dan mendorong adopsi yang lebih luas.
- Peningkatan Kesadaran:
Sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat e-procurement, seperti transparansi, efisiensi, dan efektivitas, dapat meningkatkan minat dan partisipasi dalam sistem ini.

Faktor Penghambat:

- Kendala Teknis:
Masalah teknis seperti gangguan sistem, koneksi internet yang lambat, atau ketidakstabilan platform e-procurement dapat menghambat kelancaran proses pengadaan.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia:

- Kurangnya tenaga ahli dalam bidang e-procurement, baik dari sisi pengguna maupun penyedia barang dan jasa, dapat menjadi hambatan.

Potensi Risiko Keamanan Data:

Ancaman keamanan data seperti pencurian data atau peretasan sistem dapat menjadi penghalang utama dalam implementasi e-procurement.

Kurangnya Partisipasi Pengguna:

Ketidakaktifan atau kurangnya minat dari pengguna dalam menggunakan sistem e-procurement dapat menghambat pencapaian target.

Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

- Investasi dalam Infrastruktur TI:

Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TI yang mendukung e-procurement.

- Pelatihan dan Pengembangan SDM:

Memberikan pelatihan intensif kepada aparatur pemerintah dan pelaku usaha mengenai penggunaan sistem e-procurement.

- Peningkatan Keamanan Data:

Menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi data dari ancaman siber.

- Sosialisasi dan Edukasi:

Terus-menerus mensosialisasikan manfaat e-procurement kepada seluruh pemangku kepentingan.

- Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan:

Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem e-procurement dan melakukan perbaikan berdasarkan temuan.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk mencapai peningkatan persentase kebijakan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa, beberapa program dan kegiatan berikut dapat dipertimbangkan:

- Peningkatan Infrastruktur dan Sistem:
- Pengembangan Platform e-Procurement:

Membangun atau meningkatkan sistem e-procurement yang andal, aman, dan mudah digunakan. Ini termasuk memastikan platform dapat diakses oleh semua penyedia dan pengguna, serta memiliki fitur yang lengkap untuk seluruh proses pengadaan.

- Penyediaan Akses Internet:

Memastikan ketersediaan akses internet yang stabil dan terjangkau di seluruh wilayah kerja, terutama bagi penyedia potensial yang berada di daerah terpencil.

- Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:

Memberikan pelatihan kepada pengguna sistem e-procurement (baik dari pihak pemerintah maupun penyedia) mengenai cara penggunaan sistem, serta pemahaman mengenai kebijakan e-procurement.

- Peningkatan Kapasitas dan Pemahaman:

- Sosialisasi dan Edukasi:

Melakukan sosialisasi yang masif mengenai manfaat dan prosedur e-procurement kepada seluruh stakeholder, termasuk pelaku usaha, masyarakat, dan aparatur pemerintah.

- Pendidikan dan Pelatihan:

Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan mengenai e-procurement bagi aparatur pemerintah yang terlibat dalam proses pengadaan.

- Penyusunan Panduan:

Menyusun panduan teknis dan operasional yang jelas dan mudah dipahami terkait pelaksanaan e-procurement, termasuk contoh kasus dan FAQ.

Pengawasan dan Evaluasi:

- Monitoring dan Evaluasi:

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan e-procurement, termasuk mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi.

- Penegakan Hukum:

Memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran kebijakan e-procurement, baik bagi aparatur pemerintah maupun penyedia.

- Peningkatan Transparansi:

Meningkatkan transparansi dalam seluruh proses pengadaan, termasuk pengumuman informasi pengadaan secara terbuka dan mudah diakses.

Program Peningkatan Partisipasi:

- Penyediaan Informasi:

Menyediakan informasi yang lengkap dan akurat mengenai paket pengadaan yang ditawarkan melalui e-procurement.

Fasilitasi Akses:

Memfasilitasi akses penyedia, terutama UKM, untuk dapat berpartisipasi dalam proses e-procurement.

- Pemberian Insentif:

Memberikan insentif bagi penyedia yang aktif berpartisipasi dalam e-procurement, seperti kemudahan akses informasi, proses pembayaran yang lebih cepat, atau keringanan persyaratan.

Integrasi Sistem:

- Integrasi dengan Sistem Lain:

Mengintegrasikan sistem e-procurement dengan sistem lain yang terkait, seperti sistem perencanaan anggaran, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi manajemen aset.

- Pemanfaatan Data:

Memanfaatkan data yang terkumpul dari sistem e-procurement untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Gambar 1.

Kegiatan Pendampingan mengenai paket pengadaan yang ditawarkan melalui E-Procurement



Sumber : Bagian PBJ Kab. Padang Pariaman

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran strategis “meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e-procurement” dibutuhkan anggaran Rp. 34.840.000,- dengan serapan anggaran tahun 2024 Rp 31.870.000 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 91,48 %. Realisasi kinerja sasaran strategis merncapai 100% dan dikategorikan Berhasil.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang ,mencapai target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target .

Tabel 2.18

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan dalam peningkatan pemanfaatan e-procurement	Persentase Kebijakan E Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	100	91,48	8,52 %

Efisiensi Capaian Kinerja = 100 % - 100 % = 0%
Efisiensi Penyerapan Anggaran = 100% - 91,48% = 8,52%
Total Efisiensi = 0 + 8,52%= 8,52%

Sasaran 5 :
Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik

Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang Bernilai Baik.

Salah satu metode untuk mengetahui sejauh mana kualitas penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sesuai Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Melalui survei ini, pengguna layanan dapat memberikan penilaian yang berharga mengenai kinerja pelayanan publik, mengukur kepuasan mereka secara kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya menjadi alat evaluasi bagi penyelenggara layanan untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, memastikan bahwa harapan dan hak-hak masyarakat sebagai warga negara terpenuhi. Dengan langkah ini, diharapkan pelayanan publik dapat semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sesuai yang dimatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam pelayanan publik merupakan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang terdapat pada misi ke-5 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis, melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif,

partisipatif dan transparan”. Indokator Kinerja dari sasaran strategis ini adalah Persentase Unit Kerja Pelayanan Publik yang bernilai baik.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 2.19

Capaian Persentase UKPP Pemerintah Daerah

yang Bernilai Baik Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Capaian	%	
Persentase UKPP yang bernilai baik	%	100%	94%	94	Berhasil

Dari Tabel 1 dapat di lihat, Persentase Unit Kerja Pelayanan Publik yang bernilai baik tahun 2024 yaitu 94% dari target yang ditetapkan adalah 100% dengan kategori “Berhasil”, Artinya secara umum Unit Kerja Penyelenggara Pekayanan dari total 71 (tujuh puluh satu) sampel UKPP yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, diperoleh 68 (enam puluh delapan) UKPP yang bernilai baik dan 3 (tiga) UKPP yang bernilai “C” (kurang baik) sehingga secara rata-rata Nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat UKPP diperoleh sekitar 84, 88 yaitu bernilai “B” (Baik).

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Daerah pada tahun 2023 dengan Tahun 2024:

Tabel 2.20

Perbandingan Target dan Capaian SKM

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
Persentase UKPP yang bernilai baik	%	N/A	92,3%	100	100%	94%	94	Berhasil

Pada tabel 2,20 dapat dilihat bahwa capaian kinerja UKPP yang bernilai baik di lingkunga Pemerintah Daerah tahun 2023 dan tahun 2024 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dengan interpretasi baik. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

selalu berkeinginan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di segala sektor sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Daerah yang bernilai baik tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

Komitmen Pimpinan setiap Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan menjadi faktor utama dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pelayanan.

Koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Bagian Organisasi berserta Tim pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan selaku pembina, pengevaluasi dan pemantau penyelenggara pelayanan dengan Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKPP) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Menjadikan hasil rekomendasi dan evaluasi dari pengguna pelayanan sebagai salah satu patokan dan memperbaiki kulaitas pelayanan.

Respon yang maksimal dari UKPP yang di evaluasi/yang dibina dalam mempersiapkan dokumen maupun sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan publik.

Disamping faktor-faktor pendukung diatas, terdapat pula faktor-faktor penghambat dalam upaya pencapaian kinerja antara lain :

Keterbatasan aggaran untuk perbaikan dan kelengkapan sarana dan parsarana yang yang layak sesuai dibutuhkan penunjang penyelenggaraan pelayanan;

Keterbatasan SDM seperti komptensi SDM yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan dan SDM yang kurang trampil menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan;

Informasi pelayanan yang kurang jelas dikarenakan masih ada UKPP yang belum memiliki Standar Pelayanan sehingga terkadang menjadikan pengguna layanan terkendala dengan prosedur berbelit belit.

Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

- Melakukan pengembangan terhadap sistem pengelolaan pengaduan untuk setiap Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan agar lebih transparan dan respontif;
- Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM penyelenggara pelayanan salah satunya dengan mengikuti Bimtek dan atau Kapasiti building;
- Melakukan dan melahirkan inovasi-inovasi yang dapat menunjang kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan dapat meberikan akses terbaik terhadap pengguna pelayanan.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk mencapai Indikator kinerja persentase UKPP yang bernilai baik tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang

Pariaman melaksanakan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan tersebut salahsatunya:

Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Anggaran Rp. 50.000.000 dan realisasi anggarannya Rp. 49.600.000 atau dengan persentase 99,2%. Hasil dari SKM ini menjadi salah satu patokan atau standar perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang tertuang sebagai janji perbaikan pelayanan pada UKPP.

Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana. Pada Sub Kegiatan ini pada tahun 2024 di anggarkan sebesar Rp. 21.599.600 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 19.948.000 atau dengan persentase 92,35%. Anggaran digunakan untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik ke Unit Kerja Pelayanan.

Gambar 1



Sosialisasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Gambar 2

Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat



Gambar 3

Monev dan Pembinaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



Gambar 4

Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik





Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik” dengan indikator sasaran strategis “Persentase UKPP yang bernilai baik” dibutuhkan anggaran Rp. 80.512.400,- dengan serapan anggaran tahun 2024 Rp 79.306.500 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 98,50 %. dan Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 94%.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indicator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target

Tabel 2.21

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik	Persentase UKPP yang bernilai baik	94%	85,91	- 4,50 %

Efisiensi Capaian Kinerja = 94 % - 100 % = - 6 %
Efisiensi Penyerapan Anggaran = 100%-98,50% = 1,50%
Total Efisiensi = -6% + 1,50 % = - 4,50 %

Sasaran 6 :
Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang Ditindaklanjuti

Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang Ditindaklanjuti

Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan sasaran strategis Sekretariat Daerah yang terdapat pada misi ke-5 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan”. Adapun indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk menilai kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, dilakukan evaluasi SAKIP guna memberikan nilai, atribut, apresiasi, dan solusi atas masalah yang ditemukan. Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah daerah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setiap tahun dalam bentuk Lembar Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai hasil evaluasi SAKIP dan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan SAKIP Pemerintah Daerah Kedepan.

Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi LHE SAKIP Pemerintah Daerah keseluruhan dikali 100%.

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian indikator kinerja Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti:

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 2.22
Capaian Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah
yang ditindaklanjuti Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Capaian	%	
Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100	Berhasil

Dari Tabel 2.22 dapat di lihat, Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti tahun 2024 yaitu 100% dari target yang ditetapkan adalah 100% dengan kategori “Sangat Berhasil”, Artinya keseluruhan dari total 10 (sepuluh) rekomendasi pada LHE SAKIP pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 telah ditindaklanjuti sepanjang tahun 2024 melalui rencana aksi tindaklanjut atas hasil LHE SAKIP Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Berikut ini adalah perbandingan target dan Capaian Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 dengan Tahun 2024:

Tabel 2.23

Perbandingan Target dan Capaian LHE Sakip

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Interpretasi
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100	100%	100%	100	Berhasil

Pada tabel 2,23 dapat dilihat bahwa indikator kinerja Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti tahun 2023 dan tahun 2024 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan 100% dengan interpretasi sangat berhasil. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menindaklanjuti semua saran-saran dan rekomendasi perbaikan implementasi SAKIP kedepan.

Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

Komitmen pimpinan, baik pimpinan daerah maupun pimpinan OPD, dalam menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP;

Sinergitas yang baik oleh Tim Kerja SAKIP Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki fungsi untuk memantau dan mendampingi OPD dalam merealisasikan capaian kinerja sesuai dengan target indikator dalam SAKIP. Selain itu, tim kerja ini melakukan pendekatan dan pendampingan kepada OPD yang belum dapat melakukan perbaikan;

Konsolidasi menyeluruh kepada seluruh OPD untuk meningkatkan serta melakukan perbaikan terhadap implementasi SAKIP termasuk efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja;

Dukungan dari semua pihak, mulai dari pimpinan OPD sampai ke level staf untuk bersama-sama melakukan perbaikan dan sinkronisasi dokumen perencanaan hingga ke laporan kinerja.

Rutin melakukan rapat koordinasi Tim SAKIP Kabupaten untuk memastikan capaian kinerja dengan tujuan kinerja berdasarkan selaras rencana kerja yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga dapat ditindaklanjuti untuk agenda penyelesaian kinerja.

Disamping faktor-faktor pendukung diatas, terdapat pula faktor-faktor penghambat dalam upaya pencapaian kinerja antara lain :

Kurangnya SDM yang memadai sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindaklanjut atas LHE SAKIP Pemerintah Daerah kurang maksimal;

Lambatnya response OPD dalam membrikan data-data yang diperlukan dalam upaya pemenuhan evidence atas rencana aksi tindak lanjut LHE SAKIP Pemerintah Daerah.

Strategi/Langkah-langkah Perbaikan dalam Pencapaian Kinerja

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut atas rekomendasi LHE SAKIP Pemerintah Daerah;

Melakukan pembahasan berkala dengan Tim SAKIP Kabupaten terkait tindaklanjut LHE SAKIP Pemerintah Daerah;

Melakukan penyusunan SK Tim Kerja SAKIP Pemerintah Daerah.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk mencapai indikator kinerja “Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti”, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Program/Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan indikator tersebut, yaitu:

Kegiatan Penataan Organisasi, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Jumlah anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 58.328.000,00 dan dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 54.909.705,00 persentase capaian sebesar 94,14%. Sub Kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan implementasi SAKIP sebagai berikut :

- Rapat-rapat pembahasan LHE SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2023
- Pemetaan rencana aksi tindak lanjut atas LHE SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2023 termasuk penetapan target penyelesaian dan penanggung jawab
- Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
- Koordinasi terkait perbaikan dokumen perencanaan seluruh OPD
- Koordinasi terkait perbaikan dokumen pelaporan kinerja seluruh OPD

Gambar 1.

Rapat Perumusan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LHE SAKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Tanggal 17 Januari 2024 dipimpin langsung oleh Bapak Sekda



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2024 realisasi biaya untuk kegiatan penunjang indikator kinerja adalah Rp 54.909.705,00 sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 58.328.000,00. Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 5.86% . Persentase efiseinsi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat di asumsikam bahwa pada tahun 2024 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber baya biaya. Namun bila dilihat pada hasil yang diperoleh, anggaran tersebut sudah sangat efisien.

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah” dengan Indikator “Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti” dibutuhkan anggaran Rp. 58.328.000,- dengan serapan anggaran tahun 2024 Rp 54.909.705,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 94,13 %. dan Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%.

Adapun analisis efisiensi hanya dimunculkan pada indicator kinerja yang ,mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target

Tabel 2.24

Analisis Efisiensi terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	100%	94,13	5,87%

Efisiensi Capaian Kinerja = 100 % - 100 % = 0 %
Efisiensi Penyerapan Anggaran = 100%-94,13% = 5,87%
Total Efisiensi = 0% + 5,87 %= 5,87 %

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berikut capaian IKD dan SPM Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 :

Tabel 2.9

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sekretariat Daerah

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja tahun 2024	Indikator Kinerja tahun 2025	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	100%	100%	100%	100%	-	n/a	100%	100%	IKU
2	Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti	Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	117%	n/a	100 %	100 %	IKU
3	Jumlah lembaga pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 lembaga	n/a	5 Lembaga	5 Lembaga	IKU

	alquran yg telah dibina	alquran yg telah dibina									
4	Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	60 (cukup)	60 (cukup)	60 (cukup)	60 (cukup)	56,40	n/a	60 (cukup)	60 (cukup)	IKU
5	Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	100%	100%	100%	100%	2,51	n/a	100%	100%	IKU
6	persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti.	persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti.	14%	15%	15%	15%	1400	n/a	15%	15%	IKU
7	Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik	Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik	100%	100%	100%	100%	65,04	n/a	100%	100%	IKU
8	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	n/a	100%	100%	IKU

9	Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa	Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa	1400	1500	1600	1600	528	n/a	1600	1600	IKD
10	Indeks reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	64	65	66	66	79,12	n/a	66	66	IKD
11	Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar	Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar	76,83	77,33	78,16	78,16	97,39	n/a	78,16	78,16	IKD
12	Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100	100	100	100	100	n/a	100	100	
13	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	100	100	100	100	-150,79	n/a	100	100	
14	Persentase efisiensi belanja	Persentase efisiensi belanja	13	14	15	15	13	n/a	15	15	

	barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD	barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD									
15	Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	100	100	100	100	100	n/a	100	100	
16	Persentase Rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	Persentase Rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	75	80	85	85	98,70	n/a	85	85	
17	Perentase Laporan Realisasi kegiatan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Perentase Laporan Realisasi kegiatan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	100	100	100	100	n/a	100	100	
18	Persentasen peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah	Persentasen peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah	95	100	100	100	99	n/a	100	100	
19	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	95	100	100	100	99	n/a	100	100	

	pelayanan kehumasan dan keprotokolan	pelayanan kehumasan dan keprotokolan									
20	Persentase acara daerah yang sesuai standar keprotokolan	Persentase acara daerah yang sesuai standar keprotokolan	95	100	100	100	99	n/a	100	100	
21	Persentase kerjasama informasi dengan mass media	Persentase kerjasama informasi dengan mass media	95	100	100	100	99	n/a	100	100	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwasannya Indikator Kinerja Daerah (IKD) tahun 2024 sebanyak 3 Indikator yaitu Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa mempunyai target 1400 dengan capaian target di tahun 2024 sebanyak 528 , Indeks reformasi birokrasi yang mempunyai target dengan nilai 66 dan capaiannya di tahun 2024 mencapai nilai 79,12 dan Persentase Pelayanan dasar yang memenuhi standar dengan target 76,83 dan realisasi capaian di tahun 2024 mencapai nilai 97,39. jadi dapat di simpulkan Sekretariat Daerah mempunyai indikator sasaran yang termasuk kedalam IKD pencapaiannya sudah melebihi capaian target yang diberikan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Sekretariat dari indikator terdapatindikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
 1. Persentase Terpenuhinya medical Check Up KDH/WKDH
 2. Persentase OPD yang tepat tugas dan fungsinya
 3. Persentase perangkat daerah dengan nilai sakip A ke atas
 4. Nilai komponen pelaporan pada LHE SAKIP hasil evaluasi Kemenpan
 5. Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah
 6. Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri
 7. Peringkat Kab Padang Pariaman di MTQ Provinsi
 8. Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah antara lain :
 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Penyaluran hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial masyarakat terkendala pada lambatnya pengurus masjid/mushalla/ majelis taklim

melengkapi persyaratan penyaluran hibah, serta belum memberikan laporan realisasi hibah yang diterima

- Perlu peningkatan penambahan anggaran pada kegiatan Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) agar lebih banyak hafiz/hafizah penerima *reward*/hadiah/beasiswa Gebupafa ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.
- Pada sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Sosial dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat terkendala karena adanya *recofusing* anggaran sehingga anggaran pada sub kegiatan ini tidak tersedia

2. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama

- Belum adanya pemetaan kerja sama daerah.
- Rendahnya respon OPD terhadap Prosedur Kerja sama daerah.
- Rendahnya partisipasi perangkat daerah atas kegiatan kerja sama yg dilaksanakan
- Masih banyaknya kerja sama daerah yang blm tertib sesuai aturan.

3. Bagian Hukum

- Proses penjadwalan harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham membutuhkan waktu yang agak lama karena banyaknya Ranperda dan Ranperbup 19 Kabupaten/Kota yang masuk ke Kanwil Kemenkumham
- Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah mengenai *Legal Drafting* penyusunan produk hukum, sehingga menyebabkan lambatnya proses penyusunan produk hukum.
- Lambatnya Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil perbaikan SK, Perbup dan Perda sehingga membuat terhambatnya/ lambatnya pekerjaannya

4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- Masih banyak OPD yang belum melaksanakan transaksi belanja dengan menggunakan e-katalog local
- Anggaran yang tidak mencukupi untuk melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia PBJ
- Kurangnya jumlah fungsional pengelola PBJ sebagaimana yang direkomendasikan oleh LKPP.
- Belum maksimalnya penggunaan aplikasi SPSE dalam penginputan E-kontrak.

5. Bagian Administrasi Pembangunan

- Masih ada OPD yang belum patuh menyerahkan laporan tepat waktu
 - Terbatasnya anggaran, sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi tidak bisa optimal
6. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh OPD teknis karena kurangnya anggaran.
 - Lamanya terbit data PDRB/income per kapita baru di publish di Februari tahun berikutnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga berdampak pada pengambilan keputusan.
 - Tidak terlaksananya kegiatan Bimtek BUMD/BLUD
 - Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga harga pupuk tidak terpantau.
7. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- Pelayanan keprotokolan kegiatan bupati, Wabup dan sekda belum maksimal karena kurangnya kompetensi SDM sebagai protokol dan kurangnya SDM.
 - Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi keprotokolan seperti kendaraan roda empat, laptop dan kamera.
8. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Masih rendahnya pemahaman pejabat pengelola keuangan yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap poroses perencanaan, proses penganggaran maupun tentang pengelolaan keuangan daerah.
 - Belum terkoordinasinnnya perencanaan bagian-bagian pada lingkup lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman secara maksimal, sehingga masih terdapat kecenderungan perencanaan yang bersifat mandiri menyebabkan daya dorong terhadap tercapainya dampak dari program kegiatan tidak maksimal.
 - Bendahara bagian-bagian yang masih kurang paham terkait pelaksanaan aturan, sehingga memperlambat administrasi.
 - Proses meminta data ke bagian-bagian yang masih memakan waktu cukup lama, sehingga memperlambat proses pembuatan laporan.
 - Proses perencanaan belum terlalu mengarah kepada skala prioritas dan indikator kinerja utama.
9. Bagian Umum
- Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM di Bagian Umum.
 - Terbatasnya sarana dan prasarana di Bagian Umum.

- Terjadinya rasionalisasi terhadap anggaran akibat terbatasnya anggaran.

10. Bagian Organisasi

- Substansi Indikator penilaian yang belum tersosialisasi dengan baik dari Kemenpan RI
- Belum maksimalnya koordinasi dalam pelaksanaan 8 aspek penilaian RB, Pemahaman OPD pelaksana terkait dengan substansi RB.
- Agen Perubahan tingkat daerah belum berjalan maksimal.
- Anggaran belum maksimal baik dalam tatalaksana grand desain maupun pelaksanaan, tertib administrasi & dokumen belum terlaksana

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Review terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2026 (T-C 31)

No	Rancangan Awal RENJA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
	SEKRETARIAT DAERAH				42.501.223.117	SEKRETARIAT DAERAH				42.499.716.827	
	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/LKOTA</u>	Sekretariat Daerah	<i>Indeks Kematangan Organisasi</i>	31	36.805.223.217	<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/LKOTA</u>	Sekretariat Daerah	<i>Indeks Kematangan Organisasi</i>	31	36.803.716.927	
			<i>Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N</i>	91,37				<i>Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N</i>	91,37		
			<i>Persentase Pemenuhan Operasional Pimpinan Sesuai Aturan</i>	100%				<i>Persentase Pemenuhan Operasional Pimpinan Sesuai Aturan</i>	100%		
			<i>Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah</i>	85				<i>Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah</i>	85		
			<i>Rekomendasi Nilai LHE SAKIP yang ditindaklanjuti</i>	81				<i>Rekomendasi Nilai LHE SAKIP yang ditindaklanjuti</i>	81		

		<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan Pimpinan Sesuai Aturan</i>	100%			<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan Pimpinan Sesuai Aturan</i>	100%		
		<i>Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti</i>	100%			<i>Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti</i>	100%		
		<i>Persentase Fasilitas Keprotokolan kegiatan Daerah yang sesuai aturan</i>	100%			<i>Persentase Fasilitas Keprotokolan kegiatan Daerah yang sesuai aturan</i>	100%		
		<i>Persentase Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan sesuai strategi Komunikasi</i>	100%			<i>Persentase Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan sesuai strategi Komunikasi</i>	100%		
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	206.506.540	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	205.000.250	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	156.506.340	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	155.000.050	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 Laporan	50.000.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 Laporan	50.000.200	

		Kinerja SKPD				Kinerja SKPD			
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	2 Laporan	23.937.662.326	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	100%	23.937.662.326		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	225/14 Orang/bulan	23.471.221.526	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	225/14 Orang/bulan	23.471.221.526		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	386.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	386.400.000		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	40.040.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	40.040.800		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	40.000.000		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	12 Laporan	17.995.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	12 Laporan	17.995.000		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	17.995.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	17.995.000		

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1. Jumlah ASN yang Terfasilitasi Naik Pangkat 2. Jumlah ASN Terfasilitasi Kenaikan Gaji Berkala 3. Jumlah SKP ASN Semester dan Akhir Tahun 4. Jumlah ASN yang disediakan pakaian Dinas	63 orang	1.217.650.700	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1. Jumlah ASN yang Terfasilitasi Naik Pangkat 2. Jumlah ASN Terfasilitasi Kenaikan Gaji Berkala 3. Jumlah SKP ASN Semester dan Akhir Tahun 4. Jumlah ASN yang disediakan pakaian Dinas	63 orang	1.217.650.700
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	1.042.650.700	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	1.042.650.700
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	50 Orang	175.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	50 Orang	175.000.000
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1. Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan 2. Jumlah Layanan yang Pelayanan yang Terfasilitasi	1626 surat	1.627.479.300	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1. Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan 2. Jumlah Layanan yang Pelayanan yang Terfasilitasi	1626 surat	1.627.479.300
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	74.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	74.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	454.460.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	454.460.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	150.006.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	150.006.900
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	124.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	124.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	240.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	240.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	560.012.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	560.012.400
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Penambahan Nilai Aset	10 Unit	1.931.130.000	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Penambahan Nilai Aset	10 Unit	1.931.130.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	1.511.600.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	1.511.600.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	239.880.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	239.880.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	179.650.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	179.650.000
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1. Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia, 2. Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang tersedia	5 kegiatan	3.562.380.400	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1. Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia, 2. Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang tersedia	5 kegiatan	3.562.380.400

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	50.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	799.950.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	799.950.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	100.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2.612.430.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2.612.430.400
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1. Jumlah Objek Aset yang terkelola 2. Total Nilai Aset	123 Unit	644.940.000	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1. Jumlah Objek Aset yang terkelola 2. Total Nilai Aset	123 Unit	644.940.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	249.990.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	249.990.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	80.000.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	80.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	64.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	64.950.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	250.000.000

	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Jumlah Kepala Daerah yang difasilitasi administrasi keuangan dan Operasional nya	2 (KDH/WK DH)	1.051.036.951	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Jumlah Kepala Daerah yang difasilitasi administrasi keuangan dan Operasional nya	2 (KDH/WK DH)	1.051.036.951	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji KDH/WKDH	2/14 Orang/Bulan	368.536.951	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji KDH/WKDH	2/14 Orang/Bulan	368.536.951	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	52.500.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	52.500.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	30.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	30.000.000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2/12 Orang/Bulan	600.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2/12 Orang/Bulan	600.000.000	
	FASILITASI KERUMAHTANGAAN SEKRETARIAT DAERAH	Jumlah paket fasilitas kerumahtanggaan sekretariat daerah	2 (KDH/WK DH)	1.614.014.000	FASILITASI KERUMAHTANGAAN SEKRETARIAT DAERAH	Jumlah paket fasilitas kerumahtanggaan sekretariat daerah	2 (KDH/WK DH)	1.614.014.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	988.014.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	988.014.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	626.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	626.000.000	
	PENATAUSAHAAN ORGANISASI	Jumlah dokumen penataan organisasi perangkat daerah	2 Dokumen	399.438.000	PENATAUSAHAAN ORGANISASI	Jumlah dokumen penataan organisasi perangkat daerah	2 Dokumen	399.438.000	

		Jumlah OPD yang difasilitasi peningkatan pelayanan publik	3 OPD			Jumlah OPD yang difasilitasi peningkatan pelayanan publik	3 OPD		
		Jumlah Dokumen LKJIP yang tersusun	1 Dokumen			Jumlah Dokumen LKJIP yang tersusun	1 Dokumen		
		Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang tersusun	1 Laporan			Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang tersusun	1 Laporan		
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	45 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	45 Dokumen	100.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	17 Laporan	102.370.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	17 Laporan	102.370.000	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	102.068.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	102.068.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	25.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	25.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	70.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	70.000.000	
	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang difasilitasi keprotokolannya	210 Kegiatan	594.990.000	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang difasilitasi keprotokolannya	210 Kegiatan	594.990.000	
		jumlah kegiatan komunikasi pimpinan	210 Kegiatan			jumlah kegiatan komunikasi pimpinan	210 Kegiatan		
		Jumlah dokumentasi kegiatan pelaksanaan tugas pimpinan	1 Dokumen			Jumlah dokumentasi kegiatan pelaksanaan tugas pimpinan	1 Dokumen		

Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	350.000.000	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	350.000.000	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	145.000.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	145.000.000	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	99.990.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	99.990.000	
<u>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</u>	<i>Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang efektif dilaksanakan</i>	100%	4.984.999.900	<u>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</u>	<i>Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang efektif dilaksanakan</i>	100%	4.984.999.900	
	<i>Indeks Zakat Indonesia</i>	0,645			<i>Indeks Zakat Indonesia</i>	0,645		
	<i>Persentase produk hukum yang dihasilkan</i>	100			<i>Persentase produk hukum yang dihasilkan</i>	100		
	<i>Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan</i>	100			<i>Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan</i>	100		
	<i>Persentase Administrasi Tata pemerintahan Yang Dilaksanakan</i>	100			<i>Persentase Administrasi Tata pemerintahan Yang Dilaksanakan</i>	100		
ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Jumlah laporan administrasi tata pemerintahan yang laksanakan	1 Dokumen	185.000.000	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Jumlah laporan administrasi tata pemerintahan yang laksanakan	1 Dokumen	185.000.000	
	Jumlah permasalahan kewilayahan yang terdokumentasi	5 Permasalahan an			Jumlah permasalahan kewilayahan yang terdokumentasi	5 Permasalahan an		
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	30.000.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	30.000.000	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	55.000.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	55.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	100.000.000	

	FASILITASI KERJASAMA DAERAH		Jumlah kerjasama tingkat daerah yang terfasilitasi	16 Kerjasama	50.000.000	FASILITASI KERJASAMA DAERAH		Jumlah kerjasama tingkat daerah yang terfasilitasi	16 Kerjasama	50.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	50.000.000	
	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Jumlah laporan laporan kegiatan bina mental spiritual yang terfasilitas	10 laporan	4.400.000.000	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Jumlah laporan laporan kegiatan bina mental spiritual yang terfasilitas	10 laporan	4.400.000.000	
			Jumlah kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial,	2 kegiatan				Jumlah kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial,	2 kegiatan		
			jumlah laporan kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat	2 Laporan				jumlah laporan kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat	2 Laporan		
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	4.110.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	1.800.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	220.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	70.000.000	

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	70.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	70.000.000	
	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi dalam penataan, penyusunan dan implementasi produk hukum daerah	430 Laporan	349.999.900	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi dalam penataan, penyusunan dan implementasi produk hukum daerah	430 Laporan	349.999.900	
		Jumlah kasus hukum pemda yang terbantu/terfasilitas	10 Kasus			Jumlah kasus hukum pemda yang terbantu/terfasilitas	10 Kasus		
		Jumlah produk hukum yang diinformasikan dan didokumentasikan	430 Dokumen			Jumlah produk hukum yang diinformasikan dan didokumentasikan	430 Dokumen		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	430 Dokumen	70.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	430 Dokumen	70.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	199.999.900	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	199.999.900	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	430 Dokumen	100.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	430 Dokumen	100.000.000	
	<u>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</u>	<u>Return on Aset (ROA) BUMD</u>	0	711.000.000	<u>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</u>	<u>Return on Aset (ROA) BUMD</u>	0	711.000.000	
		<u>Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan</u>	1,82			<u>Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan</u>	1,82		
		<u>Konsumsi listrik per kapita</u>	654			<u>Konsumsi listrik per kapita</u>	654		

		<i>Tingkat Kematangan UKPBJ</i>	9			<i>Tingkat Kematangan UKPBJ</i>	9		
		<i>Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama</i>	0			<i>Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama</i>	0		
		<i>Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif</i>	88			<i>Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif</i>	88		
		<i>Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan</i>	25			<i>Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan</i>	25		
		<i>Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah</i>	90			<i>Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah</i>	90		
	-	<i>Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan Yang Efektif Dilaksanakan</i>	100		-	<i>Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan Yang Efektif Dilaksanakan</i>	100		
	PELAKSANAAN KEBIAJAKAN PEREKONOMIAN	Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian	1 Laporan	145.000.000	PELAKSANAAN KEBIAJAKAN PEREKONOMIAN	Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian	1 Laporan	145.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	75.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	75.000.000	

	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	40.000.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	40.000.000	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	30.000.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	30.000.000	
	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah laporan administrasi pembangunan daerah yang sesuai aturan	3 Laporan	150.000.000	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah laporan administrasi pembangunan daerah yang sesuai aturan	3 Laporan	150.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	100.000.000	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	50.000.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	50.000.000	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	50.000.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	50.000.000	
	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi sesuai aturan		305.000.000	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi sesuai aturan		305.000.000	
		Jumlah laporan pelaksanaan advokasi dan pembinaan pengadaan barang dan jasa				Jumlah laporan pelaksanaan advokasi dan pembinaan pengadaan barang dan jasa			
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	110 Dokumen	195.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	110 Dokumen	195.000.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 Dokumen	60.000.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 Dokumen	60.000.000	

	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60 Orang	50.000.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60 Orang	50.000.000	
	PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM		Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	1 laporan	61.000.000	PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM		Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	1 laporan	61.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	26.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	26.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen	15.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen	15.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	20.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	20.000.000	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Sekretariat Daerah. Namun dalam proses ini Sekretariat Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Daftar Tabel Belanja Hibah ke Masyarakat

Nom or	Tangg al SP2D	Nomor SP2D	Nama Penerima	Keterangan	Jen is SP2 D	Brutto	Potong an	Netto	Keteran gan
1	17 Juli 2024	13.05/04.0/000132/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	TERLAMPIR	Belanja Hibah Uang diserahkan kepada masyarakat An Masjid Al Hidayah Kec Patamuan dan Masjid lainnya (119 Masjid) berdasarkan SK Bupati Padang Pariaman Nomor 67 KEP BPP 2024 tgl 5 2 2024 sesuai daftar terlampir (dana berasal dari DAU-SG Kes, Dana Taging)	LS	892.500.000	-	892.500.000	Safari Ramadhan
2	19 Juli 2024	13.05/04.0/000138/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	TERLAMPIR	Belanja Hibah Uang untuk masyarakat An Surau Batung Kec V Kotim dan Masjid Mushalla Surau MajelisTaklim TPA lainnya (74 Masjid Mushalla Surau TPA) sesuai SK Bupati Pdg Pariaman No 72 KEP BPP 2024 tgl 7 2 2024, daftar terlampir, dana Taging (DAU SG-Kes)	LS	1.806.000.000	-	1.806.000.000	Pokir Tahap 1
3	29 Agustus 2024	13.05/04.0/000169/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P7/8/2024	TERLAMPIR	PEMBAYARAN Belanja Hibah Uang diserahkan ke masyarakat An PP Nurul Yaqin M Qalbi Kec Pd Sago dan Masjid, Surau, BKMT lainnya (18 Masjid, Surau, BKMT) sesuai SK Bupati Pdg Pariaman No 72 KEP BPP 2024 tgl 7 2 2024, daftar terlampir, dana taging (DAU SG-Kes)	LS	550.000.000	-	550.000.000	Pokir Tahap 2
4	6 Desember 2024	13.05/04.0/000315/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	TERLAMPIR	Belanja Hibah Uang diserahkan kepada masyarakat (Guru Mengaji) An M Indra Febriadi dan kawan kawan (sebanyak 70 orang guru mengaji) sesuai dengan SK Bupati Padang Pariaman no 318/KEP/BPP/ 2024 tgl 3 Juli 2024, daftar terlampir, dana tagging (DAU SG-Kes)	LS	300.000.000	-	300.000.000	Pokir Tahap 3
5	9 Desember 2024	13.05/04.0/000336/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	TERLAMPIR	Belanja Hibah Uang diserahkan kpd masyarakat An Mushalla Nurul Falah Kec V Koto Kp Dlm & Surau Nurul Iman Kec Bt Gsn (sebanyak 2 Mushalla) sesuai SK Bupati Pd Prm no 318/KEP/BPP/ 2024 tgl 3 Juli 2024, daftar terlampir, dana tagging (DAU SG-Kes)	LS	75.000.000	-	75.000.000	Pokir Tahap 4
6	9 Desember 2024	13.05/04.0/000344/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	TERLAMPIR	Pembayaran Belanja Hibah Uang yg diserahkan kepada masyarakat An Masjid Raya Lubuk Pandan Kec 2x11 EL dan Masjid lainnya (sebanyak 32 Masjid) sesuai SK Bupati Pd Pariaman no 318/KEP/BPP/ 2024 tgl 3 Juli 2024, daftar terlampir, dana tagging (DAU SG-Kes)	LS	1.460.000.000	-	1.460.000.000	Pokir Tahap 5
J U M L A H						5.083.500.000			

Daftar Tabel Hibah Ke Lembaga

Nomor	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Brutto	Potongan	Netto
1	2 Oktober 2024	13.05/04.0/000199/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P7/10/2024	TERLAMPIR	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada NU dan Muhammadiyah Padang Pariaman sesuai SK Bupati Padang Pariaman No 315/KEP/BPP/2024 sesuai persetujuan terlampir, dana berasal dari Dana Taging (DAU-SG Kes)	LS	100.000.000		100.000.000
2	11 Desember 2024	13.05/04.0/000366/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	BAZNAS PADANG PARIAMAN	Pembayaran Belanja Hibah Uang yang diserahkan kepada Baznas Padang Pariaman sesuai dengan SK Bupati Padang Pariaman no 315/KEP/BPP/2024 tgl 2 Juli 2024, daftar terlampir, dana tagging (DAU SG-Kes)	LS	150.000.000	-	150.000.000
				J U M L A H		250.000.000		

Lampiran SPM Nomor : 13.05/03.0/000196/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024

Tanggal SPM : 15 Juli 2024

: Fasilitasi Bina Mental Spiritual

Nama Sub Kegiatan Bagian Kesra

Nomor Rekening Belanja : 5.1.05.05.03.0001

Nama Rekening Belanja : Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Daftar : Rekapitulasi Pembayaran Belanja Hibah uang kepada Masjid/Mushalla/Surau Penerima Bantuan Safari Ramadhan 2024 Kab. Padang Pariaman

NO	NAMA MASJID/ MUSHALLA/ SURAU	NAGARI	JUMLAH BANTUAN (Rp)	REKENING	KETERANGAN
1	Surau Rimbo	Padang Bintungan	7.500.000	05000210391562	Bank Nagari
2	Masjid Raya Padang Kandang	Padang Kandang Pulau Aia Padang Bintungan	7.500.000	71000220480324	Bank Nagari
3	Musholla Al Ikhlas	Kurai Taji	7.500.000	05000210389300	Bank Nagari
4	Masjid Raya Sungai Laban	Kurai Taji Timur	7.500.000	71000220348540	Bank Nagari
5	Masjid Darussalam	Sunua Barat	7.500.000	71000220554675	Bank Nagari
6	Mesjid Baitul Makmur	Sunua	7.500.000	71000201016496	Bank Nagari
7	Masjid Raya Sunur	Sunua Tengah	7.500.000	03210100237156 2	Bank BRI
8	Musholla Angga Baru	Pauh Kambar	7.500.000	71000201051404	Bank Nagari
9	Mesjid Raya At Tagwa	Kapalo Koto	7.500.000	71000201046062	Bank Nagari
10	Surau Gadang Tonggak	Padang Kandang Pulau Aia Padang Bintungan	7.500.000	71000220480125	Bank Nagari
11	Surau Al Ikhlas	Balah Hilir Lubuk Alung	7.500.000	71000220553076	Bank Nagari
12	Musholla Darul Wustha	Aie Tajun Lubuk Alung	7.500.000	71000201043413	Bank Nagari
13	Surau Balanti	Sikabu Lubuk Alung	7.500.000	71000220376385	Bank Nagari
14	Surau Tawaqal	Punggung Kasiak Lubuk Alung	7.500.000	71000201051603	Bank Nagari
15	Mesjid Al Ikhlas	Sungai Abang Lubuk Alung	7.500.000	71000220415305	Bank Nagari
16	Surau Darussalam Tanah Taban	Pasia Laweh Lubuk Alung	7.500.000	71000201052491	Bank Nagari
17	Mesjid Muhajirin	Lubuk Alung	7.500.000	54880102187553 4	Bank BRI
18	Surau Ambacang	Singguliang Lubuk Alung	7.500.000	71000201055792	Bank Nagari

19	Mesjid Jami Syech Burhanudin	Salibutan Lubuk Alung	7.500.000	71000220551481	Bank Nagari
20	Masjid Al Furqan	Balah Hilir Lubuk Alung	7.500.000	17000210276313	Bank Nagari
21	Surau Aie Datang	Sicincin	7.500.000	17010210106223	Bank Nagari
22	Surau Patamuan Jambak Sigaung	Sungai Asam	7.500.000	17010210113050	Bank Nagari
23	Surau Pincuran Tembok	Lubuk Pandan	7.500.000	71000201051496	Bank Nagari
24	Masjid Raya Pauh	Sicincin	7.500.000	17010210068972	Bank Nagari
25	Surau Kandang Gadang	Pakandangan	7.500.000	71000201056212	Bank Nagari
26	Masjid Ikhlas Balah Aie	Koto Tinggi	7.500.000	71000220380946	Bank Nagari
27	Surau Kapuah	Gadur	7.500.000	71000220476824	Bank Nagari
28	Surau Korong Padang Baru	Parik Malintang	7.500.000	71000220466070	Bank Nagari
29	Pesantren Darul Ikhlas Batang Kapecong	Toboh Ketek	7.500.000	71000220466803	Bank Nagari
30	Masjid Raya Lubuk Idai	Koto Tinggi	7.500.000	17010210092540	Bank Nagari
31	Surau Batang Tapakih	Anduriang	7.500.000	71000220461461	Bank Nagari
32	Musholla Baithul Makmur	Guguak	7.500.000	17010210113982	Bank Nagari
33	Mesjid Al Muttaqin	Kayutanam	7.500.000	17010210056433	Bank Nagari
34	Musholla Nurul Ikhlas	Kapalo Hilalang	7.500.000	71000201050671	Bank Nagari
35	Masjid Alhuda Tarok	Kapalo Hilalang	7.500.000	17010210049544	Bank Nagari
36	Surau Jambak	Tandikek	7.500.000	71000201050936	Bank Nagari
37	Masjid Raya Labu Kambuung	Tandikek Selatan	7.500.000	17010210059801	Bank Nagari
38	Surau Talang Kuniang	Tandikek Utara	7.500.000	71000201052314	Bank Nagari
39	Surau Polongan Lapau Jambu	Sungai Durian	7.500.000	71000201055033	Bank Nagari
40	Mesjid Raya Koto Mambang Kampuang Tanjung	Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai durian	7.500.000	71000220547141	Bank Nagari
41	Surau Batu	Tandikek Barat	7.500.000	71000220469544	Bank Nagari
42	Masjid Al Hidayah	Tandikek	7.500.000	71000220551713	Bank Nagari
43	Surau Baru Simpang Gantiang	Kudu Gantiang	7.500.000	71000201035374	Bank Nagari
44	Mesjid Al Ihsan	Limau Puruik	7.500.000	71000201055254	Bank Nagari

45	Surau Baru Sungai Kalu	Kudu Gantiang Barat	7.500.000	05020210063433	Bank Nagari
46	Mesjid Raya Kayu Angik	Gunuang Padang Alai	7.500.000	71000201035514	Bank Nagari
47	Masjid Nurul Iman	Kudu Gantiang	7.500.000	05020210062991	Bank Nagari
48	Masjid Raya Gasan Gadang	Gasas Gadang	7.500.000	71000201037113	Bank Nagari
49	Musholla Al mukminin Elang laut	Malai V Suku	7.500.000	71000201037706	Bank Nagari
50	Masjid Raya Balingkuang	Malai V Suku Timur	7.500.000	71000220420544	Bank Nagari
51	Surau Darussalam Kampung Tengah	Malai V Suku	7.500.000	71000201045152	Bank Nagari
52	Surau Lapai	Koto Dalam Barat	7.500.000	71000220429596	Bank Nagari
53	Surau Ungku Abun	Koto Dalam	7.500.000	71000220420872	Bank Nagari
54	Mesjid Istiqomah	Koto Dalam Selatan	7.500.000	71000220505432	Bank Nagari
55	Surau Dagang Pasar Padang Sago	Batu Kalang	7.500.000	71000220421001	Bank Nagari
56	Surau Jambu	Batu Kalang Utara	7.500.000	71000220741800	Bank Nagari
57	Mesjid Nurul Huda	Koto Baru	7.500.000	71000220422434	Bank Nagari
58	Surau Mangoi	Batu Kalang	7.500.000	71000201051345	Bank Nagari
59	Masjid Nurul Iman Palambayan	Sintuak	7.500.000	71000220545181	Bank Nagari
60	Masjid Al Hasyar	Toboh Gadang	7.500.000	17000210329270	Bank Nagari
61	Surau Korong Rimbo Kaduduak	Toboh Gadang Timur	7.500.000	17000210355822	Bank Nagari
62	Surau Ketek Toboh Musajik	Toboh Gadang Barat	7.500.000	71000220537584	Bank Nagari
63	Surau Takapik	Sintuak	7.500.000	71000201050785	Bank Nagari
64	Surau Manggih Al Ikhlas	Sungai Gimba Ulakan	7.500.000	71000220454671	Bank Nagari
65	Surau Kampung Paneh	Padang Toboh Ulakan	7.500.000	71000220421664	Bank Nagari
66	Surau Jawi Jawi	Manggopoh Palak Gadang Ulakan	7.500.000	05000210379566	Bank Nagari
67	Surau Labuah	Sandi Ulakan	7.500.000	71000220545273	Bank Nagari
68	Surau Parupuak	Ulakan	7.500.000	71000201052561	Bank Nagari
69	Surau Gauang	Seulayat Ulakan	7.500.000	71000201052454	Bank Nagari
70	Surau Kalampaian	Kampaung Galapuang Ulakan	7.500.000	71000201048335	Bank Nagari
71	Surau Korong Syekh H Musa	Tapakih	7.500.000	71000201045922	Bank Nagari

72	Surau Rawang	Ulakan	7.500.000	71000220744320	Bank Nagari
73	Musholla Nurul Hidayah	III Koto Aur Malintang Utara	7.500.000	16020210035281	Bank Nagari
74	Surau Pauah	III Koto Aur Malintang	7.500.000	76540101030253 5	Bank BRI
75	Surau Lenong	Balai Baiak Malai III koto	7.500.000	71000201050833	Bank Nagari
76	Mesjid Istiqomah	III Koto Aur Malintang Selatan	7.500.000	71000201050914	Bank Nagari
77	Surau Nurul Taqwa	III Koto Aur Malintang Timur	7.500.000	71000220466884	Bank Nagari
78	Surau Duku	III Koto Aur Malintang	7.500.000	76540101034753 5	Bank BRI
79	Masjid Taqwa	Pilubang	7.500.000	71000201052760	Bank Nagari
80	Musholla Paraman Talang	Kuranji Hilir	7.500.000	71000201052373	Bank Nagari
81	Surau Anjuang	Koto Tinggi Kuranji Hilir	7.500.000	71000201051835	Bank Nagari
82	Mesjid Nur Ikhlas	Guguak Kuranji Hilir	7.500.000	71000220359434	Bank Nagari
83	Masjid Mustaqim Padang Olo	Kuranji Hilir	7.500.000	71000220385146	Bank Nagari
84	Surau Lansano Buluh Apo	Malai III Koto	7.500.000	71000201053375	Bank Nagari
85	Surau Kampuang Batu Mengaum	Kuranji Hulu	7.500.000	71000201051905	Bank Nagari
86	Musholla Nurul Falah Kampuang Tengah	Batu Gadang Kuranji Hulu	7.500.000	71000201051710	Bank Nagari
87	Surau Durian Kambuik	Sungai Sirah Kuranji Hulu	7.500.000	71000201052325	Bank Nagari
88	Surau Ungku Tuo	Kuranji Hulu	7.500.000	71000201052351	Bank Nagari
89	Musholla Taqwa Tandikat	Campago	7.500.000	54870102562353 7	Bank BRI
90	Musholla Al Hidayah Tapai Aia Lansano	Sikucur	7.500.000	71000201051625	Bank Nagari
91	Musholla Kincie Tampiak Kinaro	Sikucur Tengah	7.500.000	71000220742592	Bank Nagari
92	Mesjid Darussalam	Sikucur Utara	7.500.000	54870100491053 7	Bank BRI
93	Musholla Taqwa Surau Ampangan	Campago Selatan	7.500.000	71000201052104	Bank Nagari
94	Musholla Baiturrahman	Sikucua Timur	7.500.000	05050210029351	Bank Nagari
95	Surau Ambacang Korong Bayur	Campago Barat	7.500.000	05000210374810	Bank Nagari
96	Masjid Nurul Hidayah	Sikucua Barat	7.500.000	71000220550862	Bank Nagari
97	Ponpes Dinul Maruf	Sikucur	7.500.000	71000201051636	Bank Nagari
98	Musholla Nurul Falah	Lareh Nan Panjang	7.500.000	71000220375906	Bank Nagari

99	Surau Kijang	Lareh Nan Panjang Barat	7.500.000	71000201051441	Bank Nagari
100	Musholla Kampung Dama	Lareh Nan Panjang Selatan	7.500.000	71000201051916	Bank Nagari
101	Surau Sianik	Lurah Ampalu	7.500.000	71000220465064	Bank Nagari
102	Surau Tengah Padang	Balah Aia	7.500.000	71000220465322	Bank Nagari
103	Mesjid Sungai Tareh	Balah Aia Utara	7.500.000	71000201051614	Bank Nagari
104	Surau Nurul Iman	Balah Aie Timur	7.500.000	71000220742382	Bank Nagari
105	Surau Dagang	Sungai Sariak	7.500.000	71000220469570	Bank Nagari
106	Surau Manggih	Lareh Nan Panjang Sungai Sariak	7.500.000	71000201050866	Bank Nagari
107	Musholla Panti Kayu	Bisati Sungai Sariak	7.500.000	71000201052605	Bank Nagari
108	Surau Labuah	Limpato Sungai Sariak	7.500.000	71000201050903	Bank Nagari
109	Surau Al Faizin	Ambuang Kapua Sungai Sariak	7.500.000	71000220360204	Bank Nagari
110	Surau Kampuang Tengah	Limpato	7.500.000	71000220464154	Bank Nagari
111	Musholla Nurul Hidayah Pangka Rajang	Sungai Buluh Timur	7.500.000	71000220421756	Bank Nagari
112	Musholla Al hasanah	Kataping	7.500.000	71000220548633	Bank Nagari
113	Surau Amanah	Sungai Buluh Barat	7.500.000	71000220462415	Bank Nagari
114	Mesjid Asra	Kasang	7.500.000	71000220706903	Bank Nagari
115	Musholla Darussalam	Sungai Buluh	7.500.000	549101021271531	Bank BRI
116	Musholla Taqwa	Buayan	7.500.000	549101018296534	Bank BRI
117	Musholla Al Ikhlas Gunung	Sungai Buluh Selatan	7.500.000	17000210398986	Bank Nagari
118	Musholla Nurul Yaqin	Sungai Buluh Utara	7.500.000	71000201051415	Bank Nagari
119	Surau Kampung Jambak	Kasang	7.500.000	549101026437530	Bank BRI
JUMLAH			892.500.000		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional.

Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Sekretariat Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk Dinas, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat Dinas perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026

Tabel 3.1
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2020-2024	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman MERATA
1.	Memperkokoh Ideologi Pancasila demokrasi, dari hak asasi manusia (HAM).	Pendidikan yang Merata dan Kesehatan yang Berkualitas	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah. Ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasiproduksi melalui peran aktif koperasi.	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata

4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.2
Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera BaratTahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
Tema		Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosal kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	

4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial
		Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah	
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel

8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah
----	---	--	--

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Padag Pariaman Tahun 2026 ” Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ”

Dengan indikator Tujuan

- 1. Indeks Reformasi Birokrasi
- 2. Nilai SAKIP Pemerintah Dearah

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggara n Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	71,5

			Daerah			
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	89
				Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,31
				Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	62
				Opini Imbusdman RI Penialain mal Administrasi Pelayanan Publik Tahun 2025	Kategori	Kualitas Sedang (76,00)
				Persentase Capaian urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	82
				Persentase Capaian Proyek Strategis Daerah	%	100

Tabel 3.4

Tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD)

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASELINE	KET
			2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB	%	72,15	
2.	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	0	
3.	Indeks Reformasi Hukum	%	72	
4.	Indeks Pelayanan Publik	%	4,3	
5.	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	%	60	
6.	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	%	1,82	
7.	Konsumsi listrik per kapita	KwH	601	
8	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,68	

Tabel 3.5

Indikator Kinerja Kunci

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASELINE	KET
			2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	25	
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	poin	13,85	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	40	
4	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	
5	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	88	
6	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	25	
7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	90	

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah	Indeks Kematangan Organisasi	33
		Persentase UPP dengan Nilai IPP baik hasil evaluasi mandiri	30
		Penyusunan LKJiP Kabupaten Tepat Waktu	100
	Meningkatnya Pelayanan Umum Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Operasional Pimpinan Sesuai Aturan	100
		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah	86
		Persentase Capaian rencana pengembangan kompetensi	100
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	81,5
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan Pimpinan Sesuai Aturan	100
		Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah	100
	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan kegiatan Daerah yang sesuai aturan	100
		Persentase Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan sesuai	100

		strategi Komunikasi	
		Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang efektif dilaksanakan	100
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat efektif dilaksanakan	100
		Indeks Zakat Indonesia	0,67
	Meningkatnya skualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang dihasilkan	100
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang difasilitasi	100
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase penyelesaian permasalahan hukum yag difasilitasi	100
		Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan	100
		Penyusunan LPPD Kabupaten Tepat Waktu	100
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan perekonomian dan SDA	Persentase Kebijakan pengelolaan perekonomian dan SDA yang Efektif dilaksanakan	100
		Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik	100
		Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	1,88

	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Konsumsi listrik per kapita	667,7
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	63
		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	90
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	30
	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	92
		Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan Yang Efektif Dilaksanakan	100
		Persentase proyek strategis daerah yang terkendalikan	100

Tabel 3.2 (TC 33)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	15	16
						SEKRETARIAT DAERAH			42.501.223.117,00						45.037.223.117,00
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			42.501.223.117,00						45.037.223.117,00
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			42.501.223.117,00						45.037.223.117,00
1	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi LHE SAKIP Sekretariat Daerah yang ditindaklanjuti	100 %	36.805.223.217,00					-	39.181.223.217,00
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen 2 Laporan	206.506.540,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan	-	-	221.506.540,00

[illegible]

												Penyeludupan			
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	2 Laporan	23.937.662.326,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-	25.952.662.326,00
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	225/14 Orang/bulan	23.471.221.526,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-		25.471.221.526,00

	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	386.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-		391.400.000,00
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	410 Dokumen	40.040.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-		45.040.800,00
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	40.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-		45.000.000,00
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	17.995.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-	22.995.000,00
	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	17.995.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan	-		22.995.000,00

												Penyeludupan			
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen 63 orang	1.217.650.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-	1.227.650.700,00
	4	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	1.042.650.700,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-		1.047.650.700,00	

	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	175.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	180.000.000,00
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan yang Terfasilitasi	12 Laporan	1.627.479.300,00		-	-	1.662.479.300,00
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	74.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	79.000.000,00
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	454.460.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	459.460.000,00
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							

						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	150.006.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		155.006.900,00
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		30.000.000,00
	4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	124.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		129.000.000,00
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	240.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		245.000.000,00
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	560.012.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		565.012.400,00
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Nilai Aset	50 unit	1.931.130.000,00			-	-	-	1.991.130.000,00
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	1.511.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		1.561.600.000,00
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	239.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		244.880.000,00
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	179.650.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		184.650.000,00

										Kel/Desa					
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang tersedia Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	100 orang 25 jasa 1626 surat	3.562.380.400,00			-	-	-	3.578.380.400,00
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		55.000.000,00
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	799.950.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		805.950.000,00
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		105.000.000,00
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.612.430.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		2.612.430.400,00
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Objek Aset yang terkelola Total Nilai Aset	125 unit 29 miliar	644.940.000,00			-	-	-	709.940.000,00
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	249.990.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		254.990.000,00
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit Unit	80.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		85.000.000,00

										Semua Kel/Desa					
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	64.950.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		69.950.000,00
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	250.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		300.000.000,00
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah yang difasilitasi administrasi keuangan dan Operasional nya	2 (KDH/WKDH)	1.051.036.951,00			-	-	-	1.156.036.951,00
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2/14 Orang/Bulan	368.536.951,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		418.536.951,00

	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	52.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		57.500.000,00
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	30.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		30.000.000,00
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2/12 Orang/Bulan	600.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		650.000.000,00
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah paket fasilitasi kerumah tanggaan sekretariat daerah	2 (KDH/WKDH)	1.614.014.000,00		-	-	-	1.619.014.000,00
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah								
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	988.014.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		988.014.000,00

										Semua Kel/Desa					
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	626.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		631.000.000,00
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen LKIP yang tersusun Jumlah dokumen penataan organisasi perangkat daerah Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang tersusun Jumlah OPD yang difasilitasi peningkatan pelayanan publik	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 3 opd	399.438.000,00			-	-	-	424.438.000,00
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	45 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		100.000.000,00
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									

							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	17 Laporan	102.370.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		107.370.000,00
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	102.068.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		107.068.000,00
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		30.000.000,00
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		80.000.000,00

	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumentasi kegiatan pelaksanaan tugas pimpinan jumlah kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang difasilitasi keprotokolannya	1 Dokumen 210 Kegiatan 210 Kegiatan	594.990.000,00			-	-	-	614.990.000,00
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	350.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		355.000.000,00
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	145.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		155.000.000,00
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan									
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	99.990.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		104.990.000,00

2	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan Data Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	4.984.999.900,00					-	5.039.999.900,00
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah laporan administrasi tata pemerintahan yang laksanakan Jumlah permasalahan kewilayahan yang terdokumentasi	12 laporan 5 permasalahan	185.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	-	205.000.000,00
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan									
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang	-		40.000.000,00

											Adil dan Makmur			
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-		60.000.000,00
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah								

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-		105.000.000,00
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial jumlah laporan kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat Jumlah laporan laporan kegiatan bina mental spiritual yang terfasilitas	2 Kegiatan 2 Laporan 10 Laporan	4.400.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	-	4.415.000.000,00
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	4.110.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-		4.110.000.000,00
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial									
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	220.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-		225.000.000,00
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat									

							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-		80.000.000,00
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kasus hukum pemda yang terbantu/terfasilitas Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi dalam penataan, penyusunan dan implementasi produk hukum daerah Jumlah produk hukum yang diinformasikan dan didokumentasikan	10 Kasus 435 Laporan 430 Dokumen	349.999.900,00			-	-	-	364.999.900,00
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	430 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		75.000.000,00

	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum									
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	199.999.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		204.999.900,00
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum									
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	430 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"		85.000.000,00
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerjasama tingkat daerah yang terfasilitasi	16 Kerja sama	50.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"	-	55.000.000,00
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri									

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"		55.000.000,00
3	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat kepatuhan BLUD dan BUMD terhadap regulasi Good Corporate Governance (GCG)	100 %	711.000.000,00					-	816.000.000,00
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian	1 laporan	145.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah	-	170.000.000,00
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah		80.000.000,00

	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	40.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	50.000.000,00
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil								
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah	40.000.000,00
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan administrasi pembangunan daerah yang sesuai aturan	3 Laporan	200.000.000,00			-	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah	225.000.000,00
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas	110.000.000,00

										Kel/Desa				Unggulan Daerah		
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan										
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah			60.000.000,00	
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan										
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah			55.000.000,00	

	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pelaksanaan advokasi dan pembinaan pengadaan barang dan jasa Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi sesuai aturan laporan efisiensi belanja barang dan jasa melalui EProcurement terhadap APBD	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	305.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah	-	330.000.000,00
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	110 Dokumen	195.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah		200.000.000,00

											Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah		70.000.000,00

	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60 Orang	50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah		60.000.000,00
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	1 Laporan	61.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah	-	91.000.000,00
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									

						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah		36.000.000,00
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah		25.000.000,00
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air								

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah		30.000.000,00
								J U M L A H	42.501.223.117,00						45.037.223.117,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Perio de Rens tra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahu n 2024	Prakir aan Capai an Target RENJ A OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Tar get	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						SEKRETARIAT DAERAH						42.501.223.1 17,00						45.037.223.1 17,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						42.501.223.1 17,00							45.037.223.1 17,00	
	4	0 1				SEKRETARIAT DAERAH						42.501.223.1 17,00							45.037.223.1 17,00	
1	4	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Rekomendasi LHE SAKIP Sekretariat Daerah yang ditindaklanjuti	-			100 %	36.805.223.2 17,00						-	39.181.223.2 17,00	

	4	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	-			5 Dokumen 2 Laporan	206.506.540,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-	-	221.506.540,00	
	4	0	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	156.506.340,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		166.506.340,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		1	1	01	06		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	50.000.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		55.000.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	-			2 Laporan	23.937.662.326,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-	-	25.952.662.326,00	

	4	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					225/14 Orang/bulan	23.471.221.526,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		25.471.221.526,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	2.	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	386.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		391.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

[illegible]

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				19 Laporan	40.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	-			1 Dokumen	17.995.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-	-	22.995.000,00	
	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	17.995.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		22.995.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-			12 Dokumen 63 orang	1.217.650.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-	-	1.227.650.700,00	
	4	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	1.042.650.700,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		1.047.650.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	175.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan yang Terfasilitasi	-			12 Laporan	1.627.479.300,00			-	-	-	-	1.662.479.300,00	
	4	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	74.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		79.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	454.460.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		459.460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	150.006.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		155.006.900,00	SEKRETARIAT DAERAH

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	239.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		244.880.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	179.650.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		184.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang tersedia Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	-			100 orang 25 jasa 1626 surat	3.562.380.400,00			-	-	-	-	3.578.380.400,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	50.000.000,0 0	Kab. Padang Pariama n, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,0 0	SEKRETA RIAT DAERAH
	4	0 1	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	799.950.000, 00	Kab. Padang Pariama n, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		805.950.000, 00	SEKRETA RIAT DAERAH
	4	0 1	0 1	2. 08	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	100.000.000, 00	Kab. Padang Pariama n, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		105.000.000, 00	SEKRETA RIAT DAERAH
	4	0 1	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.612.430.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.612.430.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Objek Aset yang dikelola Total Nilai Aset	-			125 unit 29 miliar	644.940.000,00			-	-	-	-	709.940.000,00	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				37 Unit	249.990.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		254.990.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit Unit	80.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

											Kel/Desa								
	401	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	64.950.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		69.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	401	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	250.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	401	01	211		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah yang difasilitasi administrasi keuangan dan Operasional nya	-			2 (KDH/W KDH)	1.051.036.951,00			-	-	-	-	1.156.036.951,00	
	401	01	211	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2/14 Orang/Bulan	368.536.951,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		418.536.951,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	52.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		57.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	30.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2/12 Orang/Bulan	600.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah paket fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	-			2 (KDH/W KDH)	1.614.014.000,00			-	-	-	-	1.619.014.000,00	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	988.014.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		988.014.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	626.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		631.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	0	0	2.		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen LKJIP yang tersusun	-			1 Dokumen	399.438.000,00			-	-	-	-	424.438.000,00	
		1	1	13			Jumlah dokumen penataan organisasi perangkat daerah				2 Dokumen									
							Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang tersusun				3 opd									
							Jumlah OPD yang difasilitasi peningkatan pelayanan publik													
	4	0	0	2.	00	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
		1	1	13	01		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				45 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	2.	00	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
		1	1	13	02		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				17 Laporan	102.370.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		107.370.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	0	0	2.	00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
		1	1	13	03		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	102.068.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		107.068.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	2.	00	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
		1	1	13	04		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
		1	1	13	05		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	0	0	2.		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumentasi kegiatan pelaksanaan tugas pimpinan jumlah kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang difasilitasi keprotokolannya	-			1 Dokumen 210 Kegiatan 210 Kegiatan	594.990.000, 00			-	-	-	-	614.990.000, 00	
	4	0	0	2.	00	Fasilitasi Keprotokolan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	350.000.000, 00	Kab. Padang Pariama n, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		355.000.000, 00	SEKRETA RIAT DAERAH
	4	0	0	2.	00	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	145.000.000, 00	Kab. Padang Pariama n, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		155.000.000, 00	SEKRETA RIAT DAERAH
	4	0	0	2.	00	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														

							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	99.990.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		104.990.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2	4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan Data Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-			100 %	4.984.999.900,00					-	5.039.999.900,00		
	4	01	02	2.01			Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah laporan administrasi tata pemerintahan yang laksanakan Jumlah permasalahan kewilayahan yang terdokumentasi	-			12 laporan 5 permasalahan	185.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	-	-	205.000.000,00	

	4	0	0	2.	00	Penataan Administrasi Pemerintahan														
		1	2	01	01		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	-		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	0	0	2.	00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
		1	2	01	02		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan	-	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

												n Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur					
	4	0 1	0 2	2. 01	00 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah											
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3 Dokumen	100.000.000, 00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan , Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	-		105.000.000, 00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	0	0	2.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial jumlah laporan kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat Jumlah laporan kegiatan bina mental spiritual yang terfasilitas	-			2 Kegiatan 2 Laporan 10 Laporan	4.400.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	-	-	4.415.000.000,00	
	4	0	0	2.	00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				10 Dokumen	4.110.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat	-	-		4.110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kasus hukum pemda yang terbantu/terfasilitas Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi dalam penataan, penyusunan dan implementasi produk hukum daerah Jumlah produk hukum yang diinformasikan dan didokumentasikan	-			10 Kasus 435 Laporan 430 Dokumen	349.999.900,00			-	-	-	-	364.999.900,00	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														

							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				430 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				10 Kasus	199.999.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		204.999.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				430 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak	-		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															basandi kitabulla h"					
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerjasama tingkat daerah yang terfasilitasi	-			16 Kerja sama	50.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabulla h"	-	-	55.000.000,00	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan	1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	basandi syarak, syarak basandi kitabullah"					
3	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat kepatuhan BLUD dan BUMD terhadap regulasi Good Corporate Governance (GCG)	-			100 %	711.000.000,00						-	816.000.000,00		
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian	-			1 laporan	145.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah	-	-	170.000.000,00		
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				3 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

												Kel/Des a		Ekonomi, dan Pemberanta san Kemiskinan	Unggula n Daerah				
	4	0 1	0 3	2. 01	00 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				6 Laporan	40.000.000,0 0	Kab. Padang Pariama n, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuha n Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberanta san Kemiskinan	-	-		50.000.000,0 0	SEKRETA RIAT DAERAH
	4	0 1	0 3	2. 01	00 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil													
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	30.000.000,0 0	Kab. Padang Pariama n, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuha n Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberanta san Kemiskinan	3. Transfor masi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggula n Daerah	-		40.000.000,0 0	SEKRETA RIAT DAERAH

	4	0	0	2.		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan administrasi pembangunan daerah yang sesuai aturan	-			3 Laporan	200.000.000,00			-	3. Transfor masi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggula n Daerah	-	-	225.000.000,00	
	4	0	0	2.	00	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Padang Pariama n, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Transfor masi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggula n Daerah	-		110.000.000,00	SEKRETA RIAT DAERAH
	4	0	0	2.	00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Padang Pariama n, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Transfor masi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggula n Daerah	-		60.000.000,00	SEKRETA RIAT DAERAH
	4	0	0	2.	00	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														

							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pelaksanaan advokasi dan pembinaan pengadaan barang dan jasa Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi sesuai aturan laporan efisiensi belanja barang dan jasa melalui EProcurement terhadap APBD	-			12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	305.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah	-	-	330.000.000,00	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					110 Dokumen	195.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik															

							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik					100 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah	-			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				60 Orang	50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	---------------	---	-------------------------	---	--	---	--	---------------	--------------------

	4	0	0	2.		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	-			1 Laporan	61.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah	-	-	91.000.000,00	
	4	0	0	2.	00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau,	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah	-		36.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H											42.501.223.17,00							45.037.223.17,00	

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Dinas perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Dinas harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Dinas dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Sekretariat Daerah ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Sekretariat Daerah diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Sekretariat Daerah perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang

perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Sekretariat Daerah menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Sekretariat Daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Parit Malintang, 22 September 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

RUDY REPENALDI RILIS, S.STP.MM.C.R.B.C

Pembina Utama Madya
NIP. 19790402 199803 1 003

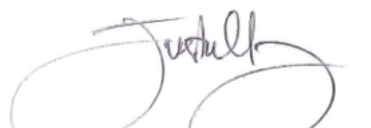
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Periode 2025 - 2029	✓
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (WILLY INDRA, ST, C.FrA)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	